

I. TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

Petugas penerima SPT pada TPT/Mobil Pajak/Pojok Pajak/Drop Box mempunyai tugas:

1. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak dalam amplop tertutup yang di atasnya ditulis :
 - Nama,
 - NPWP,
 - Tahun Pajak,
 - Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar),
 - Nomor Telepon.
2. Membubuhkan stempel KPP, tanggal penerimaan, nama, NIP dan tanda tangan pada Tanda Terima sebagaimana pada Lampiran I.1.
3. Memberikan Tanda Terima (Bagian Untuk Wajib Pajak) kepada Wajib Pajak, dan menempelkan bagian lain (Bagian Untuk Ditempelkan pada Amplop) pada amplop SPT Wajib Pajak.
4. Memisahkan antara SPT Tahunan/e-SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP sendiri dengan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain.
5. Membuat Berita Acara Serah Terima Berkas Penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana pada Lampiran I.2.
6. Menyerahkan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang diterima dan Berita Acara Serah Terima Berkas Penerimaan SPT kepada Petugas Seksi Pelayanan.

Petugas Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

1. Menerima dan meneliti SPT dan Berita Acara Serah Terima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Petugas Penerima SPT, selanjutnya meneruskan ke Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani.
2. Merekam Tanda Terima ke dalam aplikasi pengawasan.
3. Mengelompokkan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan berdasarkan tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. Melakukan penelitian terhadap SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang terdaftar di KPP sendiri.
5. Dari hasil penelitian, untuk SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang dinyatakan lengkap, diteruskan ke Petugas TPT untuk dilakukan perekaman penerimaan SPT, dan untuk SPT Tahunan/e-SPT Tahunan tidak lengkap diteruskan ke Account Representative.
6. Dari hasil pengelompokan SPT pada angka 3, untuk SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang tidak terdaftar di KPP sendiri dibuatkan/dicetak Daftar Nominatif Pengiriman SPT sebagaimana Lampiran I.4 dan dibuatkan konsep Surat Pengiriman sebagaimana Lampiran I.5.
7. Meneruskan Daftar Nominatif Pengiriman SPT dan konsep Surat Pengiriman ke Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti dan diparaf dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani.
8. Menerima Surat Pengiriman dan Daftar Nominatif yang telah ditandatangani oleh Kepala KPP.
9. Menatausahakan dan mengirimkan SPT Tahunan, Surat Pengiriman dan Daftar Nominatif sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen.
10. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah direkam dan Register Harian dari Seksi PDI untuk selanjutnya diproses sesuai SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak.
11. Dalam hal SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang diterima dari KPP lain dan/atau melalui pos/ekspedisi tidak terdaftar di KPP sendiri akibat kesalahan pengiriman, pelaksana Seksi Pelayanan meneruskan ke KPP Wajib Pajak terdaftar sesuai SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen.

Petugas TPT mempunyai tugas:

1. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah dinyatakan lengkap dari Petugas Seksi Pelayanan.
2. Melakukan perekaman penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan serta loading e-SPT Tahunan.
3. Mencetak LPAD/BPS sebagaimana Lampiran I.3 dan register harian.
4. Meneruskan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk dilakukan perekaman detail SPT.
5. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari KPP lain dan/atau dari Pos/ekspedisi untuk selanjutnya diteruskan ke Seksi Pelayanan.
6. Atas Respon Surat Permintaan Kelengkapan SPT:
 - a) Menerima kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Wajib Pajak.
 - b) Meneliti kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Wajib Pajak.
 - c) Mencetak dan menandatangani LPAD/BPS kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dan menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak.
 - d) Meneruskan kelengkapan SPT ke Account Representative.
7. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah dinyatakan lengkap oleh Account Representative untuk dilakukan perekaman penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan serta loading e-SPT Tahunan.

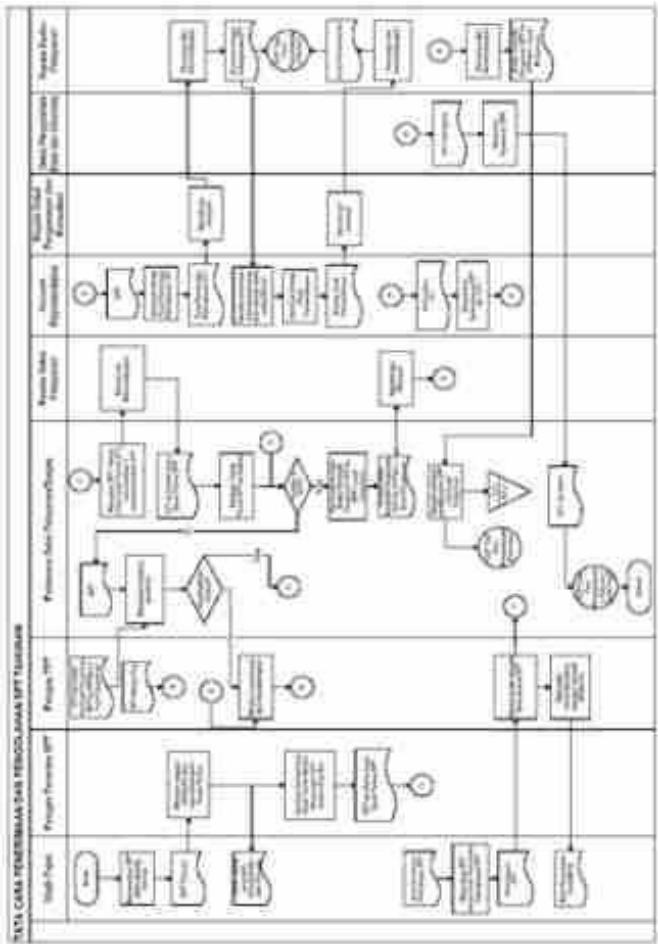
Account Representative mempunyai tugas :

1. Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Pelaksana Seksi Pelayanan yang dinyatakan tidak lengkap.
2. Membuat konsep Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan selanjutnya meneruskan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan diparaf dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani.
3. Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah ditandatangani oleh Kepala KPP selanjutnya diproses sesuai SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen.
4. Menerima kelengkapan SPT dari Petugas TPT untuk digabungkan dengan SPT Tahunan/e-SPT

- Tahunan.
- SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke Petugas TPT untuk dilakukan perekaman penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan serta loading e-SPT Tahunan.
 - Dalam hal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan tidak dipenuhi dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan, Account Representative membuat konsep Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan selanjutnya meneruskan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan diparaf dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani.

- Petugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas :
- Menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Petugas TPT yang telah diberi LPAD/BPS.
 - Merekam SPT Tahunan/loading e-SPT Tahunan ke dalam basis data perpajakan.
 - Meneruskan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang telah direkam/di-load ke Seksi Pelayanan untuk selanjutnya diproses sesuai SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak.

II. BAGAN ALUR KERJA (FLOWCHART)



 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK	 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
TANDA TERIMA SPT	TANDA TERIMA SPT
Nomor	Nomor
Tanggal	Tanggal
UNTUK DITEMPELKAN DI AMPLOP	UNTUK WAJIB PAJAK
NP.	NP.
	Tanda Terima ini merupakan bukti penerimaan yang sah sepanjang SPT telah diterima lengkap.

Petunjuk Penomoran Tanda Terima:

1. Nomor harus prenumbered.
2. Tanda terima diberi nomor urut dari nomor 1 dan seterusnya.
3. Diberi tanggal, ditandatangani oleh petugas dan dibubuhi stempel.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS
PENERIMAAN SPT MELALUI TPT/MOBIL PAJAK/POJOK PAJAK/DROP BOX**

Pada haritanggal.....bulan.....tahun, dibuat berita acara serah terima berkas:

Nama berkas: SPT Tahunan
Tanggal diterima :
Unit Drop Box : (Lokasi TPT/Mobil Pajak/Pojok Pajak/Drop Box)
Nomor Tanda Terima : s.d.
Nomor Tidak Terpakai : s.d.

	KPP Penyelenggara (berkas)		KPP Lain (berkas)		Total (berkas)	
	Badan	OP	Badan	OP	Badan	OP
SPT Nihil						
SPT Kurang Bayar						
SPT Lebih Bayar						
Total						

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Petugas I

Petugas II

Kasi Pelayanan

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor :
Tanggal :

Nama : N.P.W.P. :
Alamat : No. P.K.P. :
Jenis pajak : Ms/Thn pajak :

TEMPAT PELAYANAN TERPADU	
Uraian	Prf/Tg
Surat diterima :	
1. langsung	
2. melalui pos	

SEKSI TERKAIT	
Uraian	Prf / Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	

Uraian	Prf/Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	

PENGELOLAAN	
SPT, Tahunan PPh / masa PPh	
Uraian	Prf/Tg
PENJUALAN SPT	
1. Dicatat pada 1Q - 1	
2. Selesai di-Edit	
3. Selesai direkam	
4. Dicatat pada 1Q - 2	
Pemeriksaan	
6. Lengkap	
7. Sederhana	
7.1. Lapangan	
7.2. Kantor	

Uraian	Prf/Tg
PENYIDIKAN	
1. Diberitahukan ke penuntut umum	
2. Penyidikan	
3. Selesai diadili	
4. Diampalkan ke penuntut umum	
PENETAPAN	
1. STP	
2. SK P N	
3. SK P K D	
4. SK P K D T	
5. SK P L B	
RESTITUSI	
1. SK P K P P	
2. SP H K P	
PENGARSIPAN	
1. Dimasukkan ke induk berkas	
2. Diteruskan ke :	
3. Diterima kembali	

KANTOR PELAYANAN PAJAK



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :
Alamat :
Jenis pajak :

N.P.W.P. :
No. P.K.P. :
Ms/Thn pajak :

Petugas penerima,

KP/PDIP.3.16-96

NCP :



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP.....

DAFTAR NOMINATIF PENGIRIMAN SPT TAHUNAN/e-SPT TAHUNAN
KPP.....(KPP Tujuan)

No.	NPWP	Nama	Tahun Pajak	Tanggal Diterima SPT	Status (LB/KB/Nihil)

Kasi Pelayanan,

..... 20..
Kepala Kantor,

.....
NIP.

.....
NIP.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP.....

Jl. Telp.
..... Fax.

Nomor : S-
Lampiran : (.....)
Hal : Pengiriman berkas SPT.

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jl.
.....

Memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 tanggal 25 Februari 2009, bersama ini kami kirimkan SPT Tahunan PPh di wilayah kerja Saudara yang kami terima melalui TPT/Mobil Pajak/Pojok Pajak/Drop Box di wilayah kerja kami.

Adapun jenis berkas yang kami kirimkan adalah:

SPT Lebih Bayar :buah
SPT Kurang Bayar :buah
SPT Nihil :buah
Total :buah

Demikian untuk mendapat perhatian.

Kepala Kantor,

.....
NIP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kotak Pos xxxxx

Telepon (xxxx) xxx.xxxxx
xxx.xxxxx
Faksimili xxx.xxxxx

Nomor : xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx
Lampiran :
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan

Yth.
.....
.....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi*) yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst....

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kotak Pos xxxxx

Telepon (xxxx) xxx.xxxxx
xxx.xxxxx
Faksimili xxx.xxxxx

Nomor : xx xxxxxxxxxxxx xxxx
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan

Yth.
.....
.....

Menunjuk surat kami terdahulu :

Nomor :
Tanggal :
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan

Sampai saat ini kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang diminta belum kami terima.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka SPT Tahunan/e-SPT Tahunan Badan/Orang Pribadi*) yang telah Saudara sampaikan pada tanggal, kami anggap tidak disampaikan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

**TATA CARA PEREKAMAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
(DALAM BENTUK KERTAS)**

1. Sebelum dilakukan Perekaman terhadap SPT Tahunan yang telah dinyatakan lengkap, dibuatkan terlebih dahulu Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak sebagaimana Lampiran II.1.
2. Pembuatan Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak dilakukan oleh Pelaksana pada Seksi PDI.
3. Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak hanya dibuat untuk SPT Tahunan yang wajib melampirkan Laporan Keuangan.
4. Setelah SPT Tahunan beserta Register Harian diterima dan dicocokkan, Pelaksana Seksi PDI membuat Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak dengan cara mengutip data dari Neraca dan Laporan Laba/Rugi ke Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak sesuai dengan pengelompokan yang telah ditentukan dalam formulir tersebut tanpa mengubah nilai yang dilaporkan Wajib Pajak.
5. Merekam elemen-elemen SPT sesuai dengan menu perekaman SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam
 - a. Lampiran II.2 untuk SPT PPh WP Orang Pribadi formulir 1770
 - b. Lampiran II.3 untuk SPT PPh WP Orang Pribadi formulir 1770 S
 - c. Lampiran II.4 untuk SPT PPh WP Orang Pribadi formulir 1770 SS
 - d. Lampiran II.5 untuk SPT PPh WP Badan formulir 1771
 - e. Lampiran II.6 untuk SPT PPh WP Badan formulir 1771 \$
 - f. Lampiran II.7 Petunjuk Perekaman SPT Tahunan pada Tempat Pelayanan Terpadu
 - g. Lampiran II.8 Lembar Penelitian dengan komputer.

**TRANSKRIP
KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI
LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK**

NPWP	:										
NAMA WAJIB PAJAK	:										
JENIS PAJAK	:		1770					1771			
TAHUN PAJAK	:										

1. ELEMEN DARI NERACA

1	PIUTANG USAHA		5	UTANG JANGKA PENDEK	
2	AKTIVA LANCAR SELAIN PIUTANG USAHA		6	UTANG JANGKA PANJANG	
3	AKTIVA TETAP		7	MODAL	
4	AKTIVA LAINNYA		8	LABA ATAU RUGI TAHUN BERJALAN	
	JUMLAH			JUMLAH	

I. ELEMEN DARI LAPORAN RUGI / LABA

1.	PEREDARAN USAHA	
2.	PERSEDIAAN AWAL	
3.	PEMBELIAN / PRODUKSI	
4.	PERSEDIAAN AKHIR	
5.	HARGA POKOK PENJUALAN	
6.	LABA BRUTO USAHA	
7.	PENGHASILAN DI LUAR USAHA	
8.	BIAYA OPERASIONAL	
	A. GAJI, UPAH DSB	
	B. PENYUSUTAN	
	C. AMORTISASI	
	D. BUNGA	
	E. SEWA	
	F. ROYALTY	
	G. KERUGIAN SELISIH KURS	
	H. LAIN-LAIN	
	JUMLAH OPERASIONAL	
9.	LABA ATAU RUGI TAHUN BERJALAN	

TRANSHIP	PADA TANGGAL	NAMA	TANDA TANGAN
DIBUAT			
DIREKAM			
DITELAAH			

D.1.1.22.01

**PETUNJUK PENGISIAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI
LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK**

I. ELEMEN NERACA

1. Piutang Usaha, diisi sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih.
2. Aktiva Lancar selain Piutang Usaha, diisi dengan penjumlahan dari pos-pos Neraca antara lain Kas, Bank, Surat-surat berharga, Deposito jangka pendek, Persediaan, Pembayaran uang muka, Pembayaran pajak di muka, Piutang lain-lain, Biaya dibayar di muka, Pembayaran pajak di muka.
3. Aktiva Tetap, diisi dengan penjumlahan seluruh pos aktiva tetap dikurangi dengan penyusutan (nilai buku aktiva).
4. Aktiva Lainnya, diisi dengan penjumlahan dari pos-pos yang tidak termasuk dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tetap, misalnya Penanaman dalam surat berharga, Goodwill, Kerugian kurs yang ditangguhkan, Selisih penilaian aktiva tetap, Disagio saham, Piutang tidak lancar, Piutang kepada pemegang saham, Uang muka pada cabang, dan Harta dalam dana khusus.
5. Utang Jangka Pendek, diisi dengan penjumlahan pos-pos utang yang akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun / 1 (satu) siklus operasi normal, misalnya Pinjaman bank, Utang usaha/Utang dagang dan Biaya yang masih harus dibayar, Uang muka penjualan, Utang Pajak, Utang deviden, Pendapatan yang ditangguhkan, Kewajiban kontinjen, Utang afiliasi, Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam tahun yang bersangkutan, dan sebagainya.
6. Utang Jangka Panjang, diisi dengan penjumlahan dari pos-pos utang yang jatuh temponya tidak dalam tahun yang bersangkutan, misalnya Utang obligasi, Wesel bayar, Pajak Penghasilan yang ditangguhkan, Kewajiban lease, Kewajiban pensiun, Utang kepada pihak ketiga lainnya, dan sebagainya.
7. Modal, diisi dengan penjumlahan dari pos modal atau yang disamakan dengan modal, antara lain Modal disetor, Agio saham, Laba atau rugi sampai dengan tahun lalu, dan sebagainya.
8. Rugi atau Laba Tahun Berjalan, diisi dengan jumlah rugi atau laba untuk tahun yang bersangkutan. Dalam hal laba disajikan oleh Wajib Pajak pada sebelah kredit maka laba tersebut dipisahkan dengan pos modal. Dalam hal rugi disajikan oleh Wajib Pajak pada sebelah debet, maka angkanya dialihkan ke dalam transkrip ini di sebelah kanan dan mengurangi pos modal.

II. ELEMEN LAPORAN RUGI LABA

1. Peredaran Usaha, diisi dengan penjumlahan dari seluruh sumber penghasilan usaha Wajib pajak, baik yang berasal dari peredaran usaha, jasa, dagang, industri, maupun peredaran usaha lainnya. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan, diisi dengan jumlah penghasilan untuk tahun yang bersangkutan.
2. Persediaan Awal, bagi Wajib Pajak yang bidang usahanya industri diisi dengan jumlah seluruh persediaan barang jadi pada awal tahun yang bersangkutan. Sedangkan bagi Wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, diisi dengan jumlah seluruh jenis persediaan barang dagangan pada awal tahun yang bersangkutan.
3. Pembelian/Produksi, bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, diisi dengan penjumlahan seluruh pembelian barang dagangan selama tahun yang bersangkutan. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang bidang usahanya industri diisi dengan harga pokok produksi.
4. Persediaan Akhir, bagi Wajib Pajak yang bidang usahanya industri diisi dengan penjumlahan seluruh jenis persediaan barang jadi, pada akhir tahun yang bersangkutan. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan diisi dengan penjumlahan seluruh persediaan barang dagangan pada akhir tahun yang bersangkutan.
5. Harga Pokok Penjualan, diisi dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha industri, formulasinya adalah sebagai berikut :
$$\text{Persediaan awal barang dagangan} + \text{Harga Pokok Produksi} - \text{Persediaan akhir barang dagangan}$$
 - b. Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, formulasinya adalah sebagai berikut :
$$\text{Persediaan awal barang jadi} + \text{Pembelian} - \text{Persediaan akhir barang jadi}$$
 - a. Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa dan lainnya, tidak ada unsur harga pokok penjualan.
6. Laba Bruto Usaha, diisi dengan peredaran usaha dikurangi dengan harga pokok, yang diformulasikan sebagai berikut :
$$\text{Peredaran Usaha} - \text{Harga Pokok Penjualan} = \text{Laba Bruto Usaha}$$
7. Penghasilan Di Luar usaha, diisi dengan penjumlahan seluruh sumber penghasilan yang berasal dari luar usaha, misalnya bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan dari penjumlahan harta, dan sebagainya.
8. Biaya Operasional, diisi dengan jumlah biaya yang telah dikelompokkan sebagaimana tercantum dalam huruf A s.d. H. Terhadap jenis biaya lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok A s.d. G akan ditampung dalam kelompok H.
9. Laba atau Rugi Tahun Berjalan, diisi dengan hasil penjumlahan antara laba bruto usaha (angka 6) ditambah penghasilan di luar usaha (angka 7) dikurangi dengan biaya operasional (angka 8), dengan formulasi sebagai berikut :
$$\text{Laba Bruto Usaha} + \text{Penghasilan Di Luar Usaha} - \text{Biaya Operasional} = \text{Laba atau Rugi Tahun Berjalan}$$

CATATAN PENTING :

1. Laporan keuangan yang diinterpretasikan ke dalam transkrip adalah Laporan Keuangan yang dilampirkan oleh WP.
2. Transkrip dibuat oleh Pelaksana pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3. Transkrip harus ditandatangani oleh petugas yang membuat transkrip, petugas yang merekam dan ditelaah oleh Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
4. Semua elemen berisi jumlah Rupiah penuh tanpa sen.

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	INDUK SPT FORMULIR 1770	
1.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT
2.	TAHUN BUKU	Pada kotak sudut kanan atas	BB-TT s.d BB-TT
	IDENTITAS		
3.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
4.	NAMA WP, ALAMAT, JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS, NO. TELEPON/FAKSIMILI DAN PERUBAHAN DATA	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
	A. PENGHASILAN NETO KOLOM A.		
5.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS	Kolom A.1	Minimal 0
6.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	Kolom A.2.	Minimal 0
7.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA	Kolom A.3.	Minimal 0
8.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI	Kolom A.4.	Minimal 0
9.	JUMLAH PENGHASILAN NETO	Kolom A.5.	Minimal 0, (A.1. + A.2. + A.3. + A.4.)
10.	ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK	Kolom A.6.	Minimal 0
11.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN	Kolom A.7.	Minimal 0, (A.5. - A.6.)
	B. PENGHASILAN KENA PAJAK	KOLOM B.	
12.	KOMPENSASI KERUGIAN	Kolom B.8.	Minimal 0, Tidak boleh lebih besar dari Kolom A.7.
13.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN	Kolom B.9.	Minimal 0, (A.7. - B.8.)
14.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.10.	Diisi jumlah tanggungan pada : TK = tidak kawin, K = kawin K/I = kawin istri berpenghasilan, PH = kawin pisah harta dan penghasilan, HB = kawin, hidup berpisah
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.10.	Minimal 0, sesuai dengan perhitungan PTKP
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Kolom B.11.	Minimal 0, (B.9 - B.10)
	C. PPh TERUTANG	KOLOM C.	
17.	PPh TERUTANG	Kolom C. 12.	Minimal 0, (Tarif Ps.17 X B.11)
18.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	Kolom C. 13.	Minimal 0
19.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom C. 14.	Minimal 0, (C.12. + C.13.)
	D. KREDIT PAJAK	KOLOM D.	
20.	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	Kolom D.15.	Minimal 0
21.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	Kolom D.16.	Minimal 0, (C.14 - D.15) atau (D.15 - C.14)
22.	KODE PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG /DIPUNGUT	KolomD.16.	Otomatis berdasarkan perhitungan KB, LB, N
	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	Kolom D.17.	
23.	PPh PASAL 25 ayat (1) BULANAN	Kolom D.17.a.	Minimal 0
24.	PPh PASAL 25 ayat (7)	Kolom D.17.b.	Minimal 0

25.	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	Kolom D. 17.c.	Minimal 0
26.	FISKAL LUAR NEGERI	Kolom D. 17.d.	Minimal 0
27.	JUMLAH KREDIT PAJAK	Jumlah Kolom D.18.	Minimal 0, (D.17.a. + D.17.b. + D. 17.c. + D. 17.d.)
	E. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR	KOLOM E.	
28.	PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E. 19.	Minimal 0, (D.16 – Jumlah kolom D.18) atau (Jumlah kolom D18 – D.16))
29.	KODE PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.19 (KOTAK)	Otomatis berdasarkan perhitungan
30.	TANGGAL PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.19. (dari SSP PPh PASAL 29)	Date, dari SSP PPh Pasal 29, jika KB
31.	JUMLAH PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.19. (dari SSP PPh PASAL 29)	Minimal 0, dari SSP PPh Pasal 29, jika KB
32.	PERMOHONAN : PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 19.b MOHON :	Kolom E .	Apabila LB diisi : direstitusikan =1 diperhitungkan dengan utang pajak = 2
	F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	KOLOM F.	
33.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	Kolom F.	Minimal 0
34.	KODE ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUT	Kolom F.	Diisi: 1= 1/12 JUMLAH PADA ANGKA 16.a. 2= PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
	G. LAMPIRAN	KOLOM G.	
35.	LAMPIRAN	Kolom G.	Diisi : 1 = lengkap 0 = tidak lengkap
	PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN	LAMPIRAN - I FORMULIR 1770 - I	
	BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)	BAGIAN A.	
36.	DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK : ..(KODE)		Diisi : 1 = diaudit 0 = tidak diaudit
37.	DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK : ..(NAMA AKUNTAN PUBLIK)		Karakter
38.	OPINI AKUNTAN PUBLIK		Diisi : 1 = wajar tanpa pengecualian 2 = wajar dengan pengecualian 3 = tidak wajar 4 = tidak ada opini
	NAMA DAN NPWP AKUNTAN PUBLIK, NAMA DAN NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA DAN NPWP KONSULTAN PAJAK SERTA NAMA DAN NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK		
	1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL		
39.	PEREDARAN USAHA	Kolom 1.a.	Minimal 0
40.	HARGA POKOK PENJUALAN	Kolom 1.b.	Minimal 0
41.	LABA / RUGI BRUTO USAHA	Kolom 1.c.	All values, (1.a. - 1.b.)
42.	BIAYA USAHA	Kolom 1.d.	Minimal 0
43.	PENGHASILAN NETO (c-d)	Kolom 1.e.	All values, (1.c. - 1.d.)
	2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF		
44.	BIAYA YANG DIBEBAHKAN/DIKELUARKAN	Kolom 2.a.	Minimal 0

	UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA		
45.	PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA, YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK	Kolom 2.b.	Minimal 0
46.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN	Kolom 2.c.	Minimal 0
47.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN	Kolom 2.d.	Minimal 0
48.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	Kolom 2.e.	Minimal 0
49.	PAJAK PENGHASILAN	Kolom 2.f.	Minimal 0
50.	GAJI YANG DIBAYAR KEPADA PEMILIK/ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	Kolom 2.g.	Minimal 0
51.	SANKSI ADMINISTRASI	Kolom 2.h.	Minimal 0
52.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	Kolom 2.i.	Minimal 0
53.	BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	Kolom 2.j.	Minimal 0
54.	PENYESUAI FISKAL POSITIF LAINNYA	Kolom 2.k.	Minimal 0
55.	JUMLAH a. s.d. k	Kolom 2.l. Jumlah a s.d. k.	Minimal 0
	3. PENYESUAI FISKAL NEGATIF		
56.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA	Kolom 3.a.	Minimal 0
57.	SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL	Kolom 3.b.	Minimal 0
58.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	Kolom 3.c.	Minimal 0
59.	JUMLAH a. s.d. c.	Kolom 3 Jumlah a s.d. c.	Minimal 0, (3.a. + 3.b. + 3.c.)
60.	JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l – 3d)	Kolom 4	All values, (1.e + 2l – 3d)
	●PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN ●PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA	Halaman 2 LAMPIRAN - I FORMULIR 1770 - I	
	BAGIAN B. PENGHASILAN NETODALAM NEGERI DARI USAHADAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)	BAGIAN: B	
61.	PEREDARAN USAHA DAGANG	Kolom B.1.(3).	Minimal 0
62.	% NORMA USAHA DAGANG	Kolom B.1.(4).	Minimal 0,00
63.	PENGHASILAN NETO USAHA DAGANG	Kolom B.1.(5).	Minimal 0
64.	PEREDARAN USAHA INDUSTRI	Kolom B.2.(3).	Minimal 0
65.	% NORMA USAHA INDUSTRI	Kolom B.2.(4).	Minimal 0,00
66.	PENGHASILAN NETO USAHA INDUSTRI	Kolom B.2.(5).	Minimal 0
67.	PEREDARAN USAHA JASA	Kolom B.3.(3).	Minimal 0
68.	% NORMA USAHA JASA	Kolom B.3.(4).	Minimal 0,00
69.	PENGHASILAN NETO USAHA JASA	Kolom B.3.(5).	Minimal 0
70.	PEREDARAN USAHA PEKERJAAN BEBAS	Kolom B.4.(3).	Minimal 0
71.	% NORMA USAHA PEKERJAAN BEBAS	Kolom B.4.(4).	Minimal 0,00
72.	PENGHASILAN NETO USAHA PEKERJAAN BEBAS	Kolom B.4.(5).	Minimal 0
73.	PEREDARAN USAHA LAINNYA	Kolom B.5.(3).	Minimal 0

74.	% NORMA USAHA LAINNYA	Kolom B.5.(4).	Minimal 0,00
75.	PENGHASILAN NETO USAHA LAINNYA	Kolom B.5.(5).	Minimal 0
76.	JUMLAH BAGIAN B : PEREDARAN USAHA	Kolom B.(3). JUMLAH	Minimal 0, (B.1.(3) + B.2.(3) + B.3.(3) + B.4.(3) + B.5.(3)
77.	JUMLAH BAGIAN B: PENGHASILAN NETO	Kolom B.(5). JUMLAH	Minimal 0, (B.1.(5) + B.2.(5) + B.3.(5) + B.4.(5) + B.5.(5)
	BAGIAN C. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)	BAGIAN: C	
78.	JUMLAH PENGHASILAN BUNGA	Kolom C.1.(3).	All values
79.	JUMLAH PENGHASILAN DIVIDEN	Kolom C.2.(3).	All values
80.	JUMLAH PENGHASILAN ROYALTI	Kolom C.3.(3).	All values
81.	JUMLAH PENGHASILAN EWA	Kolom C.4.(3).	All values
82.	JUMLAH PENGHASILAN PENGHARGAAN DAN HADIAH	Kolom C.5.(3).	All values
83.	JUMLAH PENGHASILAN KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA	Kolom C.6.(3).	All values
84.	JUMLAH PENGHASILAN LAINNYA	Kolom C.7.(3).	All values
85.	JUMLAH BAGIAN C	Kolom C.(3). JUMLAH	All values, jumlah c.1. s.d. c.7.
	DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DILUAR NEGERI DAN PPh	LAMPIRAN - II FORMULIR 1770 - II	
	BAGIAN A. DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	BAGIAN A.	
86.	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	Kolom A: Kolom (7). JUMLAH BAGIAN A	Minimal 0
	●PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL, ●PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ●PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	LAMPIRAN - III FORMULIR 1770 - III	
	BAGIAN A. PENGHASILAN DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU	BAGIAN A.	
	I. DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	BAGIAN A.I.	
87.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)/PENGHASILAN BRUTO BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	Kolom A.I.1.(3).	Minimal 0
88.	PPh TERUTANG BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	Kolom A.I.1.(4).	Minimal 0
89.	DPP / PENGHASILAN BRUTO BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	Kolom A.I.2.(3).	Minimal 0
90.	PPh TERUTANG BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	Kolom A.I.2.(4).	Minimal 0
91.	DPP / PENGHASILAN BRUTO NILAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	Kolom A.I.3.(3).	Minimal 0
92.	PPh TERUTANG NILAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	Kolom A.I.3.(4).	Minimal 0
93.	DPP / PENGHASILAN BRUTO HADIAH UNDIAN	Kolom A.I.4.(3).	Minimal 0
94.	PPh TERUTANG HADIAH UNDIAN	Kolom A.I.4.(4).	Minimal 0
95.	DPP / PENGHASILAN BRUTO PESANGON,	Kolom	Minimal 0

	TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN Pensiun yang dibayar sekaligus	A.I.5.(3).	
96.	PPh TERUTANG PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN Pensiun yang dibayar sekaligus	Kolom A.I.5.(4).	Minimal 0
97.	DPP / PENGHASILAN BRUTO Honorarium atas beban APBN / APBD	Kolom A.I.6.(3).	Minimal 0
98.	PPh TERUTANG Honorarium atas beban APBN / APBD	Kolom A.I.6.(4).	Minimal 0
99.	DPP / PENGHASILAN BRUTO Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	Kolom A.I.7.(3).	Minimal 0
100.	PPh TERUTANG Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	Kolom A.I.7.(4).	Minimal 0
101.	DPP / PENGHASILAN BRUTO Nilai bangunan yang diterima dalam rangka bangun guna serah	Kolom A.I.8.(3).	Minimal 0
102.	PPh TERUTANG Nilai bangunan yang diterima dalam rangka bangun guna serah	Kolom A.I.8.(4).	Minimal 0
103.	DPP / PENGHASILAN BRUTO Sewa atas tanah dan/atau bangunan	Kolom A.I.9.(3).	Minimal 0
104.	PPh TERUTANG Sewa atas tanah dan/ atau bangunan	Kolom A.I.9.(4).	Minimal 0
105.	DPP / PENGHASILAN BRUTO Usaha jasa konstruksi	Kolom A.I.10.(3).	Minimal 0
106.	PPh TERUTANG Usaha jasa konstruksi	Kolom A.I.10.(4).	Minimal 0
107.	DPP / PENGHASILAN BRUTO Penyalur / Dealer / Agen produk BBM	Kolom A.I.11.a.(3).	Minimal 0
108.	PPh TERUTANG Penyalur / Dealer / Agen produk BBM	Kolom A.I.11.a.(4).	Minimal 0
109.	DPP / PENGHASILAN BRUTO Penyalur / Distributor rokok	Kolom A.I.11.b.(3).	Minimal 0
110.	PPh TERUTANG Penyalur / Distributor rokok	Kolom A.I.11.b.(4).	Minimal 0
111.	DPP / PENGHASILAN BRUTO Penghasilan istri dari satu pemberi kerja	Kolom A.I.12.a.(3).	Minimal 0
112.	PPh TERUTANG Penghasilan istri dari satu pemberi kerja	Kolom A.I.12.a.(4).	Minimal 0
113.	DPP / PENGHASILAN BRUTO Penghasilan anak dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan istimewa	Kolom A.I.12.b.(3).	Minimal 0
114.	PPh TERUTANG Penghasilan anak dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan istimewa	Kolom A.I.12.b.(4).	Minimal 0
115.	Jumlah PPh terutang	Kolom A.I.(4). JUMLAH	Minimal 0
	II. PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU	BAGIAN A.II.	
116.	DPP / PENGHASILAN BRUTO Penghasilan pengusaha tertentu	Kolom A.II.(3).	Minimal 0
117.	PPh TERUTANG Penghasilan pengusaha tertentu	Kolom A.II.(4).	Minimal 0
	BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	BAGIAN B.	
118.	PENGHASILAN BRUTO Bantuan / sumbangan / hibah	Kolom B.1.(3).	Minimal 0
119.	PENGHASILAN BRUTO Warisan	Kolom B.2.(3).	Minimal 0
120.	PENGHASILAN BRUTO Bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	Kolom B.3.(3).	Minimal 0
121.	PENGHASILAN BRUTO klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa	Kolom B.4.(3).	Minimal 0

122.	PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN YANG YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	Kolom B.5.(3).	Minimal 0
123.	JUMLAH BAGIAN B	Kolom B.(3). JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Minimal 0
	BAGIAN C. PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	BAGIAN C.	
124	PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	rupiah	Minimal 0
	●DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN ●DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN	LAMPIRAN - IV FORMULIR 1770 - IV	
	BAGIAN A: DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN	BAGIAN A	
125.	JUMLAH HARGA PEROLEHAN HARTA	JUMLAH kolom BAGIAN A.(5)	Minimal 0
	BAGIAN B: DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN	BAGIAN B	
126.	JUMLAH KEWAJIBAN	JUMLAH kolom BAGIAN B.(5)	Minimal 0

PEREKAMAN DATA LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DILUAR NEGERI DAN PPh	LAMPIRAN - II FORMULIR 1770 - II	
	BAGIAN A. DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	BAGIAN A.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
127.	NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	BAGIAN: A. Kolom (2)	Karakter
128.	NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	BAGIAN: A. Kolom (3)	999999999-999.999
129.	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN DAN TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	BAGIAN: A. Kolom (4) dan (5)	Karakter dan Date
130.	PPh PASAL 21 / PASAL 22 / PASAL 23 / PASAL 24/ YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	BAGIAN: A. Kolom (6)	Karakter
131.	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT	BAGIAN: A. Kolom (7)	Minimal 0
	•DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN •DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN	LAMPIRAN - IV FORMULIR 1770 - IV	
	BAGIAN A. DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN	BAGIAN A.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
132.	JENIS HARTA	BAGIAN: A. Kolom (2)	Karakter
133.	TAHUN PEROLEHAN	BAGIAN: A. Kolom (3)	TTTT
134.	HARGA PEROLEHAN	BAGIAN: A. Kolom (4)	Minimal 0
135.	KETERANGAN	BAGIAN: A. Kolom (5)	Karakter
	BAGIAN B. DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN	BAGIAN B.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
136.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	Kolom B.(2)	Karakter
137.	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	Kolom B.(3)	Karakter
138.	TAHUN PEMINJAMAN	Kolom B.(4)	TTTT
139.	JUMAH PINJAMAN	Kolom B.(5)	Minimal 0

**PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI
YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA,
DALAM NEGERI LAINNYA, YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT
FINAL**

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • DALAM NEGERI LAINNYA; • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	INDUK SPT FORMULIR 1770 S	
	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT
	PETUNJUK/PERHATIAN		
	IDENTITAS		
1.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
2.	NAMA WP, PEKERJAAN, NO. TELEPON & NO. FAKS, KLU	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
3.	PERUBAHAN DATA	Wajib Pajak	
	A. PENGHASILAN NETO	KOLOM A.	
4.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	Kolom A.1.	Minimal 0
5.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA	Kolom A.2.	Minimal 0
6.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI	Kolom A.3.	Minimal 0
7.	JUMLAH PENGHASILAN NETO	Kolom A.4.	All values, (A.1. + A.2. + A.3.)
8.	ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBYEK PAJAK	Kolom A.5.	Minimal 0
9.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN	Kolom A.6	All values
	B. PENGHASILAN KENA PAJAK	KOLOM B.	
10.	STATUS KELUARGA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.7. (TANDA PADA KOTAK)	Diisi jumlah tanggungan pada: TK = tidak kawin, K = kawin, K / I = kawin istri berpenghasilan, PH = kawin pisah harta dan penghasilan, HB = kawin, hidup berpisah
11.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.7.	Minimal 0, sesuai dengan perhitungan PTKP
12.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Kolom B.8	Minimal 0, (A.6. - B.7.)
	C. PPh TERUTANG	KOLOM C.	
13.	PPh TERUTANG	Kolom C.9.	Minimal 0, (Tarif Ps.17 X B.8.)
14.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	Kolom C.10.	Minimal 0
15.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom C.11.	Minimal 0, (C.9. + C.10.)
	D. KREDIT PAJAK	KOLOM D.	
16.	PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI	Kolom D.12.	Minimal 0
17.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI atau PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	Kolom D.13.	Otomatis dari sistem (C.11. - D.12.) atau (D.12. - C.11.)
18.	KODE PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI atau PPh	Kolom D.13.	Otomatis dari sistem

	YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	(Kotak)	0, jika : C.11 = D.12 1, jika : C.11 > D.12 2, jika : C.11 < D.12
19.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	Kolom D.14.	
20.	PPh PASAL 25 ayat (1)	Kolom D.14.a.	Minimal 0
21.	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	Kolom D.14.b.	Minimal 0
22.	FISKAL LUAR NEGERI	Kolom D.14.c.	Minimal 0
23.	JUMLAH KREDIT PAJAK	Jumlah Kolom D.15.	Minimal 0, (D.14.a. + D.14.b. + D.14.c.)
	E. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR	KOLOM E.	
24.	PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.16.	Otomatis dari sistem (selisih D.13 dan D.15)
25.	KODE PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.16. (KOTAK)	Otomatis dari sistem
26.	TANGGAL PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.16. (dari SSP PPh PASAL 29)	Date, dari SSP PPh Pasal 29, jika KB
27.	JUMLAH PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.16. (dari SSP PPh PASAL 29)	Minimal 0, dari SSP PPh Pasal 29, jika KB
	PERMOHONAN		
28.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 16.b MOHON:	Kolom E.	Diisi apabila LB: 1= direstitusikan 2= diperhitungkan dengan utang pajak
	F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	KOLOM G.	
29.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	Kolom G.18	Minimal 0
30.	KODE ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUT	Kolom G.18	Diisi: 1=1/12 JUMLAH PADA ANGKA 13. 2=PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
	G. LAMPIRAN		
31.	LAMPIRAN	Kolom G.	Diisi: 1 = lengkap 0 = tidak lengkap
	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA; PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK; DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	LAMPIRAN - I FORMULIR 1770 S	
	BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)	BAGIAN: A	
32.	JUMLAH PENGHASILAN BUNGA	Kolom A.1.(3).	Minimal 0
33.	JUMLAH PENGHASILAN DIVIDEN	Kolom A.2.(3).	Minimal 0
34.	JUMLAH PENGHASILAN ROYALTI	Kolom A.3.(3).	Minimal 0
35.	JUMLAH PENGHASILAN SEWA	Kolom A.4.(3).	Minimal 0
36.	JUMLAH PENGHASILAN PENGHARGAAN DAN HADIAH	Kolom A.5.(3).	Minimal 0
37.	JUMLAH PENGHASILAN KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA	Kolom A.6.(3).	Minimal 0
38.	JUMLAH PENGHASILAN LAINNYA	Kolom A.7.(3).	Minimal 0
39.	JUMLAH BAGIAN A	Kolom A.(3). JBA	Minimal 0, penjumlahan A.1 s.d. A.7
	BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	BAGIAN: B	
40.	JUMLAH PENGHASILAN BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	Kolom B.1.(3)	Minimal 0
41.	JUMLAH PENGHASILAN WARISAN	Kolom B.2.(3).	Minimal 0

42.	JUMLAH PENGHASILAN BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	Kolom B.3.(3).	Minimal 0
43.	JUMLAH PENGHASILAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	Kolom B.4(3).	Minimal 0
44.	JUMLAH PENGHASILAN PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	Kolom B.5.(3)	Minimal 0
45.	JUMLAH BAGIAN B	Kolom B.(3) JBB	Minimal 0, penjumlahan B.1 s.d. B.5
	BAGIAN C. DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	BAGIAN: C	
46.	JUMLAH BAGIAN C	Kolom C.(7) JBC	Minimal 0
	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN; DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN	LAMPIRAN - II FORMULIR 1770 S	
	BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	KOLOM A	
47.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)/PENGHASILAN BRUTO BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	KOLOM A.1.(3)	Minimal 0
48.	PPh TERUTANG BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	Kolom A.1.(4)	Minimal 0
49.	DPP/PENGHASILAN BRUTO BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	Kolom A.2.(3)	Minimal 0
50.	PPh TERUTANG BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	Kolom A.2.(4)	Minimal 0
51.	DPP/PENGHASILAN BRUTO PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	Kolom A.3.(3)	Minimal 0
52.	PPh TERUTANG PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	Kolom A.3.(4)	Minimal 0
53.	DPP/PENGHASILAN BRUTO HADIAH UNDIAN	Kolom A.4.(3)	Minimal 0
54.	PPh TERUTANG HADIAH UNDIAN	Kolom A.4.(4)	Minimal 0
55.	DPP/PENGHASILAN BRUTO PESANGON, TUNJANGAN HARI TUAN DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS	Kolom A.5.(3)	Minimal 0
56.	PPh TERUTANG PESANGON, TUNJANGAN HARI TUAN DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS	Kolom A.5.(4)	Minimal 0
57.	DPP/PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD	Kolom A.6.(3)	Minimal 0
58.	PPh TERUTANG HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD	Kolom A.6.(4)	Minimal 0
59.	DPP/PENGHASILAN BRUTO NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	Kolom A.7.(3)	Minimal 0
60.	PPh TERUTANG NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	Kolom A.7.(4)	Minimal 0
61.	DPP/ PENGHASILAN BRUTO SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	Kolom A.8.(3)	Minimal 0
62.	PPh TERUTANG SEWA ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN	Kolom A.8.(4)	Minimal 0
63.	DPP/PENGHASILAN BRUTO BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH	Kolom A.9.(3)	Minimal 0
64.	PPh TERUTANG BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH	Kolom A.9.(4)	Minimal 0
	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL		
65.	DPP/ PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA	Kolom A.10.a.(3)	Minimal 0
66.	PPh TERUTANG PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA	Kolom A.10.a.(4)	Minimal 0

67.	DPP/PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN	Kolom A.10.b.(3)	Minimal 0
68.	PPh TERUTANG PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN	Kolom A.10.b.(4)	Minimal 0
69.	DPP/PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	Kolom A.11.(3)	Minimal 0
70.	PPh TERUTANG BRUTO PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	Kolom A.11.(4)	Minimal 0
71.	JUMLAH BAGIAN A	Kolom A.(4) JBA	Minimal 0
	BAGIAN B. DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN	KOLOM B	
72.	JUMLAH BAGIAN B	Kolom B.(4)	Minimal 0
	BAGIAN C. DAFTAR KEWAJIBAN PADA AKHIR TAHUN	KOLOM C	
73.	JUMLAH BAGIAN C	Kolom C.(5)	Minimal 0

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU PEMBERI KERJA; • DENGAN PENGHASILAN BRUTO TIDAK MELEBIHI Rp 30 JUTA SETAHUN; • TIDAK MEMILIKI PENGHASILAN LAINNYA, KECUALI BUNGA BANK DAN BUNGA KOPERASI	FORM SPT 1770 SS	
	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT
	IDENTITAS		
1.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
2.	NAMA WP, PEKERJAAN, NO. TELEPON & NO. FAKS, KLU	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
3.	PERUBAHAN DATA	Wajib Pajak	
4.	JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN		Minimal 0
5.	JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN		Minimal 0

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WP BADAN	INDUK SPT FORMULIR 1771	
1.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT (Tahun SPT)
2.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
3.	NAMA WP	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
4.	JENIS USAHA	Diambil dari data Master File WP	
5.	KLU	Diambil dari data Master File WP	
6.	NO. Telp	Diambil dari data Master File WP	
7.	NO. FAKS	Diambil dari data Master File WP	
8.	PERIODE PEMBUKUAN	Diambil dari data Master File WP	
9.	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (KHUSUS BUT)	Pada kolom bagian atas	Karakter, khusus untuk BUT, diisi dengan nama Negara Domisili WP
10.	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	Pada kolom bagian tengah	Diisi : 1 = diaudit 0 = tidak diaudit
11.	OPINI AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	Diisi : 1 = wajar tanpa Pengecualian 2 = wajar dengan Pengecualian 3 = tidak wajar 4 = tidak ada opini
12.	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	Nama kantor akuntan publik
13.	NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	NPWP Akuntan Publik 99999999-999.999
14.	NAMA AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	
15.	NPWP AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	
16.	NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	Nama kantor konsultan pajak
17.	NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	NPWP konsultan pajak 99999999-999.999
	A. PENGHASILAN KENA PAJAK		
18.	PENGHASILAN NETO FISKAL	Kolom A.1.	All values, = kolom 6.(3). formulir 1771-I
19.	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	Kolom A.2.	Minimal 0, tidak boleh lebih besar dari A.1.
20.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	Kolom A.3.	Minimal 0, (A.1. - A.2.)
	B. PPh TERUTANG		
21.	PPh YANG TERUTANG	Kolom B.4.	Minimal 0, (Tarif Ps.17 X A.3.)
22.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	Kolom B.5.	Minimal 0
23.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom B.6.	Minimal 0, (B.4. + B.5.)
	C. KREDIT PAJAK		
24.	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (PROYEK BANTUAN LUAR NEGERI)	Kolom C.7.	Minimal 0
25.	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	Kolom C.8.a.	Minimal 0, = JUMLAH kolom (5) formulir 1771-II
26.	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	Kolom C.8.b.	Minimal 0, = JUMLAH kolom (7) formulir 1771-III
27.	JUMLAH (a + b)	Kolom C.8.JUMLAH	Minimal 0, (C.8.a. + C.8.b.)
28.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI atau PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	Kolom C.9.	Minimal 0, = (B.6. - (C.7. + C.8.)), atau = ((C.7. + C.8.) - B.6.)
29.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	Kolom C.9.a	Diisi : 0, jika: B.6. = (C.7. + C.8.) 1, jika: B.6. > (C.7. + C.8.)

			2, jika: B.6. < (C.7. + C.8.)
30.	PPH YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	Kolom C.9.b	
31.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	Kolom C.10.	
32.	PPh PASAL 25 BULANAN	Kolom C.10.a.	Minimal 0
33.	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	Kolom C.10.b.	Minimal 0
34.	PPh PASAL 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	Kolom C.10.c.	Minimal 0
35.	PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN	Kolom C.10.d.	Minimal 0
36.	JUMLAH (10a + 10b + 10c + 10d)	Kolom C.10.e	Minimal 0, (C.10.a. + C.10.b. + C.10.c. + C.10.d.)
	D. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR		
37.	PPh YANG KURANG DIBAYAR atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (9 – 10e)	Kolom D.11.	Minimal 0, (C.9. - Jumlah C.10.) atau (Jumlah C.10. - C.9.)
38.	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	Kolom D.12	
39.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON: A. DIRESTITUSIKAN	Kolom D.13.a	1 = direstitusi 0 = tidak direstitusi
40.	B. DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK	Kolom D.13.b	1 = diperhitungkan 0 = tidak diperhitungkan
	E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN		
41.	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	Kolom E.14.a.	Minimal 0
42.	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	Kolom E.14.b.	Minimal 0, = Kolom A.2.
43.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Kolom E.14.c.	Minimal 0, (F.a. - F.b.)
44.	PPh YANG TERUTANG	Kolom E.14.d.	Minimal 0, (Tarif Ps. 17 X F.c.)
45.	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	Kolom E.14.e	Minimal 0
46.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (de)	Kolom E.14.f.	Minimal 0, (F.d. - F.e.)
47.	PPh PASAL 25 : (1/12 HURUF f)	Kolom E.14.g.	Minimal 0, (1/12 X F.f.)
	F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK		
48.	PPh FINAL	Kolom F.15.a.	Minimal 0, = Jumlah KOLOM BAGIAN IV.A.(5)
49.	PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK, PENGHASILAN BRUTO	Kolom F.15.b.	Minimal 0, = Jumlah KOLOM BAGIAN IV.A.(3)
	G. LAMPIRAN		
50.	SELAIN LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA: A. SURAT SETORAN PAJAK	Kolom G.16.a	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
51.	B. LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)	Kolom G.16.b	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
52.	C. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.c	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
53.	D. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.d	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
54.	E. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.e	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
55.	F. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.f	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
56.	G. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.g	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
57.	H. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3	Kolom G.16.h	Diisi :

	PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)		1 = ada 0 = tidak ada
58.	I. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.i	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
59.	J. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.j	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
60.	K. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)	Kolom G.16.k	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
	PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	LAMPIRAN - I FORMULIR 1771 - I	
	1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI		
61.	PEREDARAN USAHA	Kolom 1.a.(3).	Minimal 0
62.	HARGA POKOK PENJUALAN	Kolom 1.b.(3).	Minimal 0
63.	BIAYA USAHA LAINNYA	Kolom 1.c.(3)	
64.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA	Kolom 1.d.(3).	Minimal 0
65.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	Kolom 1.e.(3).	Minimal 0
66.	BIAYA DARI LUAR USAHA	Kolom 1.f.(3).	Minimal 0
67.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA	Kolom 1.g.(3).	Minimal 0
68.	JUMLAH	Kolom 1.h.(3)	All values, (1.d. + 1.e.)
69.	2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	Kolom 2	
70.	3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	Kolom 3	
71.	4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	Kolom 4	
	5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF		
72.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	Kolom 5.a.(3).	Minimal 0
73.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	Kolom 5.b.(3).	Minimal 0
74.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	Kolom 5.c.(3).	Minimal 0
75.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	Kolom 5.d.(3).	Minimal 0
76.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	Kolom 5.e.(3).	Minimal 0
77.	PAJAK PENGHASILAN	Kolom 5.f.(3).	Minimal 0
78.	GAJI YANG DIBAYAR KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	Kolom 5.g.(3).	Minimal 0
79.	SANKSI ADMINISTRASI	Kolom 5.h.(3).	Minimal 0
80.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	Kolom 5.i.(3).	Minimal 0
81.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	Kolom 5.j.(3).	Minimal 0
82.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	Kolom 5.k.(3).	Minimal 0
83.	PENYESUAI FISKAL POSITIF LAINNYA	Kolom 5.l.(3).	Minimal 0
84.	JUMLAH 5a. s.d. 5l	Kolom 3.m. (3).	Minimal 0
	6. PENYESUAI FISKAL NEGATIF		
85.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	Kolom 6.a.(3).	Minimal 0
86.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	Kolom 6.b.(3).	Minimal 0
87.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	Kolom 6.c.(3).	Minimal 0
88.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	Kolom 6.d.(3).	Minimal 0
89.	JUMLAH 6a. s.d. 6d.	Kolom 6.e.(3).	Minimal 0

90.	7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE ... (Diisi dari Lampiran Khusus 4A angka 5b)	Kolom 7.a.(2). Kolom 7.b.(3).	
91.	8. PENGHASILAN NETO FISKAL	Kolom 8.(3).	All values, (Jumlah 1.(3) - Jumlah 2.(3) + Jumlah 3.(3) - Jumlah 4.(3) - Jumlah 5.(3)).
	PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA IDENTITAS (SIDJP tidak perlu mengisi)	LAMPIRAN - II FORMULIR 1771 - II	
92.	NPWP	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
93.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
94.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
95.	1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
96.	2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, TJR, dsb		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
97.	3. BIAYA TRANSPORTASI		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
98.	4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
99.	5. BIAYA SEWA		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
100.	6. BIAYA BUNGA PINJAMAN		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
101.	7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
102.	8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
103.	9. BIAYA ROYALTI		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
104.	10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		

	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
105.	11. BIAYA LAINNYA		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
106.	12. PERSEDIAAN AWAL		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
107.	13. PERSEDIAAN AKHIR		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
108.	14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13		
	HARGA POKOK PENJUALAN	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	LAMPIRAN - III FORMULIR 1771 - III	
	IDENTITAS		
109.	NPWP	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
110.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
111.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
112.	NAMA DAN NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	KOLOM (2)	
113.	OBJEK PEMOTONGAN PEMUNGUTAN		Pilih : 1 = Pasal 22 2 = Pasal 23
114.	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	KOLOM (3)	Pilih : 1 s.d 13
115.	RUPIAH	KOLOM (4)	Minimal 0
116.	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	KOLOM (5)	Minimal 0
117.	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP		karakter
118.	NOMOR	KOLOM (6)	Karakter
119.	TANGGAL	KOLOM (7)	Date
	PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	LAMPIRAN - IV FORMULIR 1771 - IV	
	IDENTITAS		
120.	NPWP	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
121.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
122.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
	BAGIAN A. PPh FINAL		
123.	1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI/SPN	BAGIAN A : Kolom 1.(2).	Minimal 0
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
124.	2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0

	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
125.	3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
126.	4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
127.	5. PENGHASILAN USAHA A. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM PERTAMINA		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
128.	B. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
129.	6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (YAYASAN / ORG. SEJENIS)		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
130.	7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
131.	8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI A. PELAKSANA KONSTRUKSI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
132.	B. PERENCANA KONSTRUKSI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
133.	C. PENGAWAS KONSTRUKSI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
134.	9. PERWAKILAN DAGANG ASING		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
135.	10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
136.	11. PELAYARAN DALAM NEGERI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
137.	12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
	BAGIAN: B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
138.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN	BAGIAN B : Kolom 1.(3).	Minimal 0

	USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 ayat (3) Huruf f UU PPh) US\$		
139.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA US\$	BAGIAN B : Kolom 2.(3).	Minimal 0
140.	 (LAINNYA-3) US\$	BAGIAN B : Kolom 3.(3).	Minimal 0
141.	JUMLAH BAGIAN B	BAGIAN B.(3).	
	DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN DAFTAR SUSUNA PENGURUS DAN KOMISARIS	LAMPIRAN - V FORMULIR 1771 - V	
	A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN UMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN		
142.	NAMA DAN ALAMAT	kolom BAGIAN A.(2).	Karakter
143.	NPWP	kolom BAGIAN A.(3).	999999999-999.999
144.	JUMLAH MODAL DISETOR RUPIAH	JUMLAH kolom BAGIAN A.(4).	Minimal 0
145.	DIVIDEN	kolom BAGIAN A.(6).	Minimal 0
146.	JUMLAH BAGIAN A	JUMLAH kolom BAGIAN A.(4). DAN A.(6)	Minimal 0
	B. DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS		
147.	NAMA DAN ALAMAT	kolom BAGIAN B.(2).	Karakter
148.	NPWP	kolom BAGIAN B.(3).	999999999-999.999
149.	JABATAN	kolom BAGIAN B.(4).	Karakter
	DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI DAN DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	LAMPIRAN - VI FORMULIR 1771 - VI	
150.	NPWP	Bagian atas	Otomatis dari masterfile
151.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas	Otomatis dari masterfile
152.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas	Otomatis dari masterfile
	BAGIAN: A DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI		
153.	Domisili perusahaan Afiliasi		1 = Dalam Negeri 2 = Luar Negeri
154.	NAMA DAN ALAMAT	JUMLAH kolom BAGIAN A.(2).	Karakter
155.	NPWP	Bagian A. (3)	999999999-999.999
156.	JUMLAH PENYERTAAN MODAL RUPIAH	Bagian A. (4)	Minimal 0
157.	%	Bagian A. (5)	
	BAGIAN: B DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ ATAU PERUSAHAAN AFILIASI		
158.	Domisili perusahaan Afiliasi		1 = Dalam Negeri 2 = Luar Negeri
159.	NAMA	BAGIAN B.(2).	Karakter
160.	NPWP	BAGIAN B.(3).	999999999-999.999
161.	JUMLAH PINJAMAN	BAGIAN B.(4).	Minimal 0
162.	TAHUN	BAGIAN B.(5).	TTTT (Tahun)
163.	BUNGA/THN %	BAGIAN B.(6).	
	BAGIAN: C DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ ATAU PERUSAHAAN AFILIASI		
164.	Domisili perusahaan Afiliasi		1 = Dalam Negeri 2 = Luar Negeri
165.	NAMA	BAGIAN C.(2).	Karakter
166.	NPWP	BAGIAN C.(3).	999999999-999-999
167.	JUMLAH PINJAMAN	BAGIAN C.(4).	Minimal 0
168.	TAHUN	BAGIAN C.(5).	TTTT (Tahun)
169.	BUNGA/THN %	BAGIAN C.(6).	

PEREKAMAN DATA LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	LAMPIRAN - III FORMULIR 1771 - III	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
170.	NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	Kolom (2)	Karakter
171.	NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	Kolom (2)	999999999-999.999
172.	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN: JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	Kolom (3)	1=Pasal 22 2=Pasal 23
173.	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN: RUPIAH	Kolom (4)	Pilih 1 s.d 13
174.	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	Kolom (5),	Minimal 0
175.	BUKTI POTONG / PUNGUT : NOMOR	Kolom (6)	Karakter
176.	BUKTI POTONG / PUNGUT : TANGGAL	Kolom (7)	Date
	DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN, DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	LAMPIRAN - V FORMULIR 1771 - V	
	BAGIAN A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN	BAGIAN A.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
177.	NAMA PEMEGANG SAHAM	BAGIAN: A Kolom (2)	Karakter
178.	ALAMAT PEMEGANG SAHAM	BAGIAN: A Kolom (2)	Karakter
179.	NPWP PEMEGANG SAHAM	BAGIAN: A Kolom (3)	999999999-999.999 dalam hal pemegang saham/pemilik bukan WP luar negeri atau bukan publik, maka NPWP harus diisi
180.	JUMLAH MODAL DISETOR (RUPIAH)	BAGIAN: A Kolom (4)	Minimal 0
181.	% JUMLAH MODAL DISETOR (%)	BAGIAN: A Kolom (5)	Minimal 0,00
182.	DIVIDEN (RUPIAH)	BAGIAN: A Kolom (6)	Minmal 0
	BAGIAN B. DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	BAGIAN B.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
183.	NAMA PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN: B Kolom (2)	Karakter
184.	ALAMAT PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN: B Kolom (2)	Karakter
185.	NPWP PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN: B Kolom (3)	999999999-999.999 dalam hal pengurus/ komisaris bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
186.	JABATAN PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN: B Kolom (4)	Karakter
	DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI DAN DAFTAR PINJAMAN (UTANG/PIUTANG) DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	LAMPIRAN - VI FORMULIR 1770 - VI	
	BAGIAN A. DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI	BAGIAN A.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
187.	NAMA PERUSAHAAN	BAGIAN A: Kolom (2)	Karakter
188.	ALAMAT PERUSAHAAN	BAGIAN A: Kolom (2)	Karakter
189.	NPWP PERUSAHAAN	BAGIAN A: Kolom (3)	999999999-999.999 dalam hal perusahaan bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
190.	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (RUPIAH)	BAGIAN A: Kolom (4)	Minimal 0
191.	% JUMLAH PENYERTAAN MODAL	BAGIAN A: Kolom (5)	Minimal 0,00
	BAGIAN B. DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	BAGIAN B.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
192.	NAMA PEMINJAM	BAGIAN B: Kolom (2)	Karakter
193.	NPWP PEMINJAM	BAGIAN B: Kolom (3)	999999999-999.999 dalam hal peminjam bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
194.	JUMLAH PINJAMAN	BAGIAN B: Kolom (4)	Minimal 0
195.	TAHUN PINJAMAN	BAGIAN B: Kolom (5)	TTTT (Tahun)

196.	BUNGA PER TAHUN	BAGIAN B: Kolom (6)	Minimal 0,00
	BAGIAN B. DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	BAGIAN B.	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
197.	NAMA PEMINJAM	BAGIAN B: Kolom (2)	Karakter
198.	NPWP PEMINJAM	BAGIAN B: Kolom (3)	999999999-999.999 dalam hal meminjam bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
199.	JUMLAH PINJAMAN	BAGIAN B: Kolom (4)	Minimal 0
200.	TAHUN PINJAMAN	BAGIAN B: Kolom (5)	TTTT (Tahun)
201.	BUNGA PER TAHUN	BAGIAN B: Kolom (6)	Minimal 0,00

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN BAGI WAJIB PAJAK
YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WP BADAN	INDUK SPT FORMULIR 1771	
1.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT (Tahun SPT)
2.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
3.	NAMA WP	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
4.	JENIS USAHA	Diambil dari data Master File WP	
5.	KLU	Diambil dari data Master File WP	
6.	NO. TELP	Diambil dari data Master File WP	
7.	NO. FAKS	Diambil dari data Master File WP	
8.	PERIODE PEMBUKUAN	Diambil dari data Master File WP	
9.	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (KHUSUS BUT)	Pada kolom bagian atas	Karakter, khusus untuk BUT, diisi dengan nama Negara Domisili WP
10.	PERSETUJUAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AS: NOMOR TANGGAL MULAI TAHUN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	
11.	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	Pada kolom bagian tengah	Diisi : 1 = diaudit 0 = tidak diaudit
12.	OPINI AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	Diisi : 1 = wajar tanpa pengecualian 2 = wajar dengan pengecualian 3 = tidak wajar 4 = tidak ada opini
13.	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	Nama kantor akuntan publik
14.	NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	NPWP Akuntan Publik 99999999-999.999
15.	NAMA AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	
16.	NPWP AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	
17.	NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	Nama kantor konsultan pajak
18.	NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	NPWP konsultan pajak 99999999-999.999
	A. PENGHASILAN KENA PAJAK		
19.	1. PENGHASILAN NETO FISKAL US\$	Kolom A.1.(3)	All values, = kolom 6.(3). formulir 1771-I
20.	1. PENGHASILAN NETO FISKAL RUPIAH	Kolom A.1.(4)	
21.	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL US\$	Kolom A.2. (3)	Minimal 0, tidak boleh lebih besar dari A.1.
22.	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL RUPIAH	Kolom A.2. (4)	
23.	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) US\$	Kolom A.3. (3)	Minimal 0, (A.1. - A.2.)
24.	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) RUPIAH	Kolom A.3. (4)	
	B. PPh TERUTANG		
25.	4. PPh YANG TERUTANG US\$	Kolom B.4. (3)	Minimal 0, (Tarif Ps.17 X A.3.)
26.	4. PPh YANG TERUTANG RUPIAH	Kolom B.4. (4)	
27.	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH	Kolom B.5. (3)	Minimal 0

	DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU US\$		
28.	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU RUPIAH	Kolom B.5. (4)	
29.	6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG US\$	Kolom B.6. (3)	Minimal 0, (B.4. + B.5.)
30.	6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG RUPIAH	Kolom B.6. (4)	
	C. KREDIT PAJAK		
31.	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (PROYEK BANTUAN LUAR NEGERI) US\$	Kolom C.7. (3)	Minimal 0
32.	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (PROYEK BANTUAN LUAR NEGERI) RUPIAH	Kolom C.7. (4)	Minimal 0
33.	8. A. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	Kolom C.8.a. (3)	Minimal 0, = JUMLAH kolom (5) formulir 1771-II
34.	8. A. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	Kolom C.8.a. (4)	
	8. B. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI US\$	Kolom C.8.b. (3)	Minimal 0, = JUMLAH kolom (7) formulir 1771-III
35.	8. B. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI RUPIAH	Kolom C.8.b. (4)	
36.	JUMLAH (a + b) US\$	Kolom C.8.JUMLAH	Minimal 0, (C.8.a. + C.8.b.)
37.	JUMLAH (a + b) RUPIAH	Kolom C.8.JUMLAH	
38.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI atau PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT US\$	Kolom C.9. (3)	Minimal 0, = (B.6. - (C.7. + C.8.)), atau = ((C.7. + C.8.) - B.6.)
39.	RUPIAH	Kolom C.9. (4)	
40.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI US\$	Kolom C.9.a (3)	Diisi : 0, jika: B.6. = (C.7. + C.8.) 1, jika: B.6. > (C.7. + C.8.) 2, jika: B.6. < (C.7. + C.8.)
41.	RUPIAH	Kolom C.9.a (4)	
42.	PPH YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT US\$	Kolom C.9.b (3)	
43.	RUPIAH	Kolom C.9.b (4)	
44.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI US\$	Kolom C.10. (3)	
45.	RUPIAH	Kolom C.10. (4)	
46.	PPh PASAL 25 BULANAN US\$	Kolom C.10.a. (3)	Minimal 0
47.	RUPIAH	Kolom C.10.a (4)	
48.	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) US\$	Kolom C.10.b. (3)	Minimal 0
49.	RUPIAH	Kolom C.10.b. (4)	
50.	PPh PASAL 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI US\$	Kolom C.10.c. (3)	Minimal 0
51.	RUPIAH	Kolom C.10.c. (4)	
52.	PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN US\$	Kolom C.10.d. (3)	Minimal 0
53.	RUPIAH	Kolom C.10.d. (4)	
54.	JUMLAH (10a + 10b + 10c + 10d) US\$	Kolom C.10.e (3)	Minimal 0, (C.10.a. + C.10.b. + C.10.c. + C.10.d.)
55.	RUPIAH	Kolom C.10.e (4)	
	D. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR		
56.	PPh YANG KURANG DIBAYAR atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (9 – 10e)	Kolom D.11. (3)	Minimal 0, (C.9. - Jumlah C.10.) atau (Jumlah C.10. - C.9.)
57.	RUPIAH	Kolom D.11. (4)	
58.	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	Kolom D.12	
59.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON: A. DIRESTITUSIKAN	Kolom D.13.a	1 = direstitusi 0 = tidak direstitusi
60.	B. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	Kolom D.13.b	1 = diperhitungkan 0 = tidak diperhitungkan
	E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN		
61.	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	Kolom E.14.a. (3)	Minimal 0
62.	RUPIAH	Kolom E.14.a. (4)	
63.	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	Kolom E.14.b. (3)	Minimal 0, = Kolom A.2.
64.	RUPIAH	Kolom E.14.b. (4)	
65.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Kolom E.14.c. (3)	Minimal 0, (F.a. - F.b.)
66.	RUPIAH	Kolom E.14.c. (4)	
67.	PPh YANG TERUTANG	Kolom E.14.d. (3)	Minimal 0, (Tarif Ps. 17 X

			F.c.)
68.	RUPIAH	Kolom E.14.d. (4)	
69.	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	Kolom E.14.e(3)	Minimal 0
70.	RUPIAH	Kolom E.14.e (4)	
71.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (de)	Kolom E.14.f. (3)	Minimal 0, (F.d. - F.e.)
72.	RUPIAH	Kolom E.14.f. (4)	
73.	PPh PASAL 25 : (1/12 HURUF f)	Kolom E.14.g. (3)	Minimal 0, (1/12 X F.f.)
74.	RUPIAH	Kolom E.14.g. (4)	
	F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK		
75.	PPh FINAL	Kolom F.15.a. (3)	Minimal 0, = Jumlah KOLOM BAGIAN IV.A.(5)
76.	RUPIAH	Kolom F.15.a. (4)	
	PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK, PENGHASILAN BRUTO	Kolom F.15.b. (3)	Minimal 0, = Jumlah KOLOM BAGIAN IV.A.(3)
77.	RUPIAH	Kolom F.15.b. (4)	
	G. LAMPIRAN		
78.	SELAIN LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA: A. SURAT SETORAN PAJAK	Kolom G.16.a	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
79.	B. LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)	Kolom G.16.b	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
80.	C. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.c	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
81.	D. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.d	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
82.	E. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.e	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
83.	F. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.f	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
84.	G. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.g	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
85.	H. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)	Kolom G.16.h	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
86.	I. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.i	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
87.	J. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	Kolom G.16.j	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
88.	K. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)	Kolom G.16.k	Diisi : 1 = ada 0 = tidak ada
	PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	LAMPIRAN - I FORMULIR 1771 - I	
	1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI		
89.	PEREDARAN USAHA US\$	Kolom 1.a.(3).	Minimal 0
90.	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	Kolom 1.b.(3).	Minimal 0
91.	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	Kolom 1.c.(3)	
92.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA US\$	Kolom 1.d.(3).	Minimal 0
93.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA US\$	Kolom 1.e.(3).	Minimal 0
94.	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	Kolom 1.f.(3).	Minimal 0

95.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA US\$	Kolom 1.g.(3).	Minimal 0
96.	JUMLAH US\$	Kolom 1.h.(3)	All values, (1.d. + 1.e.)
	2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI US\$	Kolom 2	
	3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL US\$	Kolom 3	
	4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK US\$	Kolom 4	
	5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF 97. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA US\$	Kolom 5.a.(3).	Minimal 0
98.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN US\$	Kolom 5.b.(3).	Minimal 0
99.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN US\$	Kolom 5.c.(3).	Minimal 0
100.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN US\$	Kolom 5.d.(3).	Minimal 0
101.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN US\$	Kolom 5.e.(3).	Minimal 0
102.	PAJAK PENGHASILAN US\$	Kolom 5.f.(3).	Minimal 0
103.	GAJI YANG DIBAYAR KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM US\$	Kolom 5.g.(3).	Minimal 0
104.	SANKSI ADMINISTRASI US\$	Kolom 5.h.(3).	Minimal 0
105.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL US\$	Kolom 5.i.(3).	Minimal 0
106.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL US\$	Kolom 5.j.(3).	Minimal 0
107.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA US\$	Kolom 5.k.(3).	Minimal 0
108.	PENYESUAI FISKAL POSITIF LAINNYA US\$	Kolom 5.l.(3).	Minimal 0
109.	JUMLAH 5a. s.d. 5l US\$	Kolom 3.m. (3).	Minimal 0
	6. PENYESUAI FISKAL NEGATIF		
110.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL US\$	Kolom 6.a.(3).	Minimal 0
111.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL US\$	Kolom 6.b.(3).	Minimal 0
112.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA US\$	Kolom 6.c.(3).	Minimal 0
113.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA US\$	Kolom 6.d.(3).	Minimal 0
114.	JUMLAH 6a. s.d. 6d. US\$	Kolom 6.e.(3).	Minimal 0
115.	7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE ...	Kolom 7.a.(2).	
116.	(Diisi dari Lampiran Khusus 4A angka 5b)	Kolom 7.b.(3).	
117.	8. PENGHASILAN NETO FISKAL US\$	Kolom 8.(3).	All values, (Jumlah 1.(3) - Jumlah 2.(3) + Jumlah 3.(3) - Jumlah 4.(3) - Jumlah 5.(3)).
118.	PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA	LAMPIRAN - II FORMULIR 1771 - II	
	IDENTITAS		
119.	NPWP	Bagian atas tengah kolom	Otomatis diambil dari masterfile
120.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas tengah kolom	Otomatis diambil dari masterfile
121.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas tengah kolom	Otomatis diambil dari masterfile
122.	1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN		
	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0

	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
123.	2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, TJR, dsb		
	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
124.	3. BIAYA TRANSPORTASI		
	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
125.	4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
126.	5. BIAYA SEWA		
	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
127.	6. BIAYA BUNGA PINJAMAN		
	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
128.	7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA		
	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
129.	8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH		
	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
130.	9. BIAYA ROYALTI		
	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
131.	10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		
	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
132.	11. BIAYA LAINNYA		
	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
133.	12. PERSEDIAAN AWAL		
	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
134.	13. PERSEDIAAN AKHIR		

	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
135.	14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13		
	HARGA POKOK PENJUALAN US\$	KOLOM 1 (3)	Minimal 0
	BIAYA USAHA LAINNYA US\$	KOLOM 1 (4)	Minimal 0
	BIAYA DARI LUAR USAHA US\$	KOLOM 1 (5)	Minimal 0
	JUMLAH US\$	KOLOM 1 (6)	Minimal 0
	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	LAMPIRAN - III FORMULIR 1771 - III	
	IDENTITAS		
136.	NPWP	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
137.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
138.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
139.	NAMA DAN NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	KOLOM (2)	
140.	OBJEK PEMOTONGAN PEMUNGUTAN		Minimal 0
141.	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	KOLOM (3)	Minimal 0
142.	US\$	KOLOM (4)	Minimal 0
143.	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT US\$	KOLOM (5)	Minimal 0
144.	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP		Karakter
145.	NOMOR	KOLOM (6)	Karakter
146.	TANGGAL	KOLOM (7)	Date
	PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	LAMPIRAN - IV FORMULIR 1771 - IV	
	IDENTITAS		
147.	NPWP	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
148.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
149.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas tengah kolom	Otomatis terisi dari masterfile
	BAGIAN A. PPh FINAL		
150.	1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI/SPN US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(2).	
	DASAR PENGENAAN PAJAK US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
151.	2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
152.	3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
153.	4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
154.	5. PENGHASILAN USAHA A. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM PERTAMINA		
	DASAR PENGENAAN PAJAK	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0

	B. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
155.	6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (YAYASAN / ORG. SEJENIS)		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
156.	7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
157.	8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI A. PELAKSANA KONSTRUKSI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
	B. PERENCANA KONSTRUKSI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
	C. PENGAWAS KONSTRUKSI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
158.	9. PERWAKILAN DAGANG ASING		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
159.	10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
160.	11. PELAYARAN DALAM NEGERI		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
161.	12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP		
	DASAR PENGENAAN PAJAK US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(3).	Minimal 0
	TARIF	BAGIAN A : Kolom 1.(4).	Minimal 0
	PPh TERUTANG US\$	BAGIAN A : Kolom 1.(5).	Minimal 0
	BAGIAN: B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
162.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 ayat (3) Huruf f UU PPh) US\$	BAGIAN B : Kolom 1.(3).	Minimal 0
163.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA US\$	BAGIAN B : Kolom 2.(3).	Minimal 0
164.	 (LAINNYA-3) US\$	BAGIAN B : Kolom 3.(3).	Minimal 0
165.	JUMLAH BAGIAN B BAGIAN B.(3). DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN DAFTAR SUSUNA PENGURUS DAN KOMISARIS	LAMPIRAN - V FORMULIR 1771 - V	
	A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN		
166.	NAMA DAN ALAMAT	kolom BAGIAN A.(2).	
167.	NPWP	kolom BAGIAN A.(3).	
168.	JUMLAH MODAL DISETOR US\$	JUMLAH kolom BAGIAN A.(4).	Minimal 0

169.	DIVIDEN US\$	kolom BAGIAN A.(6).	Minimal 0
170.	JUMLAH BAGIAN A US\$	JUMLAH kolom BAGIAN A.(4). DAN A.(6)	Minimal 0
	B. DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS		
171.	NAMA DAN ALAMAT	kolom BAGIAN B.(2).	Karakter
172.	NPWP	kolom BAGIAN B.(3).	999999999-999.999
173.	JABATAN	kolom BAGIAN B.(4).	karakter
	DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI DAN DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	LAMPIRAN - VI FORMULIR 1771 - VI	
174.	NPWP	Bagian atas	Otomatis dari masterfile
175.	NAMA WAJIB PAJAK	Bagian atas	Otomatis dari masterfile
176.	PERIODE PEMBUKUAN	Bagian atas	Otomatis dari masterfile
	BAGIAN: A DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI		
177.	Domisili perusahaan Afiliasi		1 = Dalam Negeri 2 = Luar Negeri
178.	NAMA DAN ALAMAT	JUMLAH kolom BAGIAN A.(2).	Minimal 0
179.	NPWP	Bagian A. (3)	999999999-999.999
180.	JUMLAH PENYERTAAN MODAL US\$	Bagian A. (4)	Minimal 0
181.	%	Bagian A. (5)	
	BAGIAN: B DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ ATAU PERUSAHAAN AFILIASI		
182.	Domisili perusahaan Afiliasi		1 = Dalam Negeri 2 = Luar Negeri
183.	NAMA	BAGIAN B.(2).karakter	
184.	NPWP	BAGIAN B.(3).	999999999-999.999
185.	JUMLAH PINJAMAN US\$	BAGIAN B.(4).	Minimal 0
186.	TAHUN	BAGIAN B.(5).	TTTT (Tahun)
187.	BUNGA/THN %	BAGIAN B.(6).	
	BAGIAN: C DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ ATAU PERUSAHAAN AFILIASI		
188.	Domisili perusahaan Afiliasi		1 = Dalam Negeri 2 = Luar Negeri
189.	NAMA	BAGIAN C.(2).	Karakter
190.	NPWP	BAGIAN C.(3).	999999999-999.999
191.	JUMLAH PINJAMAN US\$	BAGIAN C.(4).	Minimal 0
192.	TAHUN	BAGIAN C.(5).	TTTT (Tahun)
193.	BUNGA/THN %	BAGIAN C.(6).	Minimal 0

PEREKAMAN DATA LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	LAMPIRAN - II FORMULIR 1771 - II / \$	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
194.	NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	Kolom (2)	Karakter
195.	NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	Kolom (2)	999999999-999.999
196.	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN:JENIS PENGHASILAN	Kolom (3)	Karakter
197.	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	Kolom (4) (US \$)	Minimal 0
198.	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT	Kolom (5) (US \$) Untuk PPh Pasal 22 dan 23	Minimal 0
199.	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	Kolom (6) (RUPIAH) Untuk PPh Pasal 22 dan 23	Minimal 0
200.	BUKTI POTONG / PUNGUT : NOMOR	Kolom (6)	Karakter
201.	BUKTI POTONG / PUNGUT : TANGGAL	Kolom (7)	Date
	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	LAMPIRAN - III FORMULIR 1771 - III / \$	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
202.	NAMA PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	Kolom (2)	Karakter
203.	ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	Kolom (2)	Karakter
204.	JENIS PENGHASILAN	Kolom (3)	Karakter
205.	JUMLAH NETO	Kolom (4) (US \$)	Minimal 0
206.	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI	Kolom (5) (US \$)	Minimal 0
207.	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI	Kolom (6) (VALAS)	Minimal 0
208.	KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN	Kolom (7) (US \$)	Minimal 0
	DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	LAMPIRAN - V FORMULIR 1771 - V / \$	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
	BAGIAN A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL	BAGIAN A.	
209.	NAMA PEMEGANG SAHAM	BAGIAN: A Kolom (2)	Karakter
210.	ALAMAT PEMEGANG SAHAM	BAGIAN: A Kolom (2)	Karakter
211.	NPWP PEMEGANG SAHAM	BAGIAN: A Kolom (3)	999999999-999.999 dalam hal pemegang saham/pemilik bukan WP luar negeri atau bukan publik, maka NPWP harus diisi
212.	JUMLAH MODAL DISETOR	BAGIAN: A Kolom (4) (US \$)	Minimal 0
213.	% JUMLAH MODAL DISETOR (%)	BAGIAN: A Kolom (5)	Minimal 0,00
	BAGIAN B. DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	BAGIAN B.	
214.	NAMA PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN: B Kolom (2)	Karakter
215.	ALAMAT PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN: B Kolom (2)	Karakter
216.	NPWP PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN: B Kolom (3)	999999999-999.999 dalam hal pengurus/ komisaris bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
217.	JABATAN PENGURUS / KOMISARIS	BAGIAN: B Kolom (4)	Karakter
	DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI DAN DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	LAMPIRAN - VI FORMULIR 1770 - VI / \$	Jumlah record tergantung dari jumlah isian Wajib Pajak
	BAGIAN A. DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI		
218.	NAMA PERUSAHAAN	BAGIAN A: Kolom (2)	Karakter
219.	ALAMAT PERUSAHAAN	BAGIAN A: Kolom (2)	Karakter
220.	NPWP PERUSAHAAN	BAGIAN A: Kolom (3)	999999999-999.999 dalam hal perusahaan bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
221.	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	BAGIAN A: Kolom (4) (US \$)	Minimal 0
222.	% JUMLAH PENYERTAAN MODAL	BAGIAN A: Kolom (5)	Minimal 0,00
	BAGIAN B. DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI	BAGIAN B.	
223.	NAMA PEMINJAM	BAGIAN B: Kolom (2)	Karakter

224.	ALAMAT PEMINJAM	BAGIAN B: Kolom (2)	Karakter
225.	NPWP PEMINJAM	BAGIAN B: Kolom (3)	999999999-999.999 dalam hal peminjam bukan WP luar negeri, maka NPWP harus diisi
226.	JUMLAH PINJAMAN	BAGIAN B: Kolom (4) (US \$)	Minimal 0
227.	TAHUN PINJAMAN	BAGIAN B: Kolom (5)	TTTT (Tahun)
228.	BUNGA PER TAHUN	BAGIAN B: Kolom (6)	Minimal 0,00

PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI
PADA TEMPAT PELAYANAN TERPADU

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	INDUK SPT (FORMULIR 1770)	INDUK SPT FORMULIR 1770	
1.	TANGGAL SPT DITERIMA	Tanggal SPT diterima	HH-B-TTTT (Tanggal-Bulan-Tahun) Hanya diisi jika tidak diterima langsung dari WP
2.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT
3.	TAHUN BUKU	Pada kotak sudut kanan atas	BB-TT s.d. BB-TT
4.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
5.	NAMA WP, ALAMAT, JENIS USAHA	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
6.	CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO	Kolom A (kotak)	Diisi: 0 = norma 1 = diaudit 2 = opini akuntan 3 = tidak diaudit
7.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN	Kolom B.9.	All values, (A.7. - B.8.)
8.	STATUS KELUARGA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.10. (TANDA PADA KOTAK)	Diisi: 0 = tidak diberi tanda X = warisan yang belum terbagi 1 = TK = tidak kawin, 2 = K = kawin, 3 = K / I = kawin istri berpenghasilan, 4 = PH = kawin pisah harta dan penghasilan, 5 = HB = kawin, hidup berpisah
9.	JUMLAH TANGGUNGAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.10. (.....)	Diisi: 0 = tidak ada tanggungan 1 = 1 anak 2 = 2 anak 3 = 3 anak
10.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.10.	Minimal 0, sesuai dengan perhitungan PTKP
11.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Kolom B.11	Minimal 0, (B.9 - B.10)
12.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom C.14.	Minimal 0, (C.12. + C.13.)
13.	PPh PASAL 25 BULANAN	Kolom D.17.a.	Minimal 0
14.	PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.19.	Minimal 0, (D.16. - Jumlah Kolom D.17.) atau (Jumlah Kolom D.17. - D.16.)
15.	KODE PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.19. (KOTAK)	Diisi: 0, jika: D.16. = Jumlah Kolom D.17. 1, jika: D.16. > Jumlah Kolom D.17. 2, jika jumlah kolom D.16. < Jumlah Kolom D.17.
16.	PERMOHONAN PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 19.b MOHON :	Kolom E.	Diisi: 0 = tidak diisi 1 = direstitusikan 2 = diperhitungkan dengan utang pajak
17.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	Kolom F.	Minimal 0
18.	KODE ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN	Kolom F.	Diisi:

	PAJAK BERIKUT		0 = 1/12 JUMLAH PADA ANGKA 16.a. 1 = PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
19.	PEREDARAN USAHA	Kolom 1.a.	Minimal 0
20.	TANGGAL PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.19. (dari SSP PPh PASAL 29)	Date, dari SSP PPh Pasal 29, jika KODE E.19 = 1
21.	JUMLAH PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.19. (dari SSP PPh PASAL 29)	Minimal 0, dari SSP PPh Pasal 29, jika KODE E.19 = 1

**PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI
YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA / PEKERJAAN BEBAS
PADA TEMPAT PELAYANAN TERPADU**

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA / PEKERJAAN BEBAS	INDUK SPT FORMULIR 1770 S	
1.	TANGGAL SPT DITERIMA	Tanggal SPT diterima	HH-B-TTTT (Tanggal-Bulan- Tahun) Hanya diisi jika tidak diterima langsung dari WP
2.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT
3.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
4.	NAMA WP, ALAMAT, JENIS USAHA	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
5.	JUMLAH PENGHASILAN NETO	Kolom A.4.	All values, (A.1. + A.2. + A.3.)
6.	STATUS KELUARGA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.6. (TANDA PADA KOTAK)	Diisi: 0 = tidak diberi tanda X = warisan yang belum terbagi 1 = TK = tidak kawin, 2 = K = kawin, 3 = K / I = kawin istri berpenghasilan, 4 = PH = kawin pisah harta dan penghasilan, 5 = HB = kawin, hidup berpisah
7.	JUMLAH TANGGUNGAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.6. (.....)	Diisi: 0 = tidak ada tanggungan 1 = 1 anak 2 = 2 anak 3 = 3 anak
8.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	Kolom B.6.	Minimal 0, sesuai dengan perhitungan PTKP
9.	PENGHASILAN KENA PAJAK	Kolom B.7.	Minimal 0, (B.4 - B.7)
10.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom C.11.	Minimal 0, (C.9. + C.10.)
11.	PPh PASAL 25 ayat (1)	Kolom D.14.a.	Minimal 0
12.	PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.15.	Minimal 0, (D.13. - Jumlah Kolom D.14.) atau (Jumlah Kolom D.14. - D.13.)
13.	KODE PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	Kolom E.15. (KOTAK)	Diisi: 0, jika: D.13. =Jumlah Kolom D.14. 1, jika: D.13. >Jumlah Kolom D.14. 2, jika jumlahkolom D.13. < Jumlah Kolom D.14.
14.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 15.b MOHON :	Kolom F.	Diisi: 0 = tidak diisi 1 = direstitusikan 2 = diperhitungkan dengan utang pajak
15.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	Kolom G.	Minimal 0
16.	KODE ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUT	Kolom G. (Kotak)	Diisi: 0 = 1/12 JUMLAH PADA ANGKA 16.a. 1 = PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
17.	TANGGAL PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.15. (dari SSP PPh PASAL 29)	Date, dari SSP PPh Pasal 29, jika KODE F.15 = 1
18.	JUMLAH PPh KURANG DIBAYAR	Kolom E.15. (dari SSP PPh PASAL 29)	Minimal 0, dari SSP PPh Pasal 29, jika KODE F.15 = 1

**PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA
PADA TEMPAT PELAYANAN TERPADU**

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN MEMPUNYAI PENGHASILAN BRUTO TIDAK LEBIH DARI Rp 60 JUTA SETAHUN DAN TIDAK MEMILIKI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI	INDUK SPT FORMULIR 1770 SS	
1.	TANGGAL SPT DITERIMA	Tanggal SPT diterima	HH-B-TTTT (Tanggal-Bulan-Tahun) Hanya diisi jika tidak diterima langsung dari WP
2.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT
3.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
4.	NAMA WP, PEKERJAAN, KLASIFIKASI JENIS USAHA, NO. TELEPON & NO. FAKSIMILI	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
5.	PERUBAHAN DATA	Wajib Pajak	
6.	JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN	-	Minimal 0, sesuai dari harta yang dipunyai
7.	JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN		Minimal 0, sesuai dengan kewajiban/utang yang dimiliki

**PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN
PADA TEMPAT PELAYANAN TERPADU**

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WP BADAN	INDUK SPT FORMULIR 1771	
1.	TANGGAL SPT DITERIMA	Tanggal SPT diterima	HH-B-TTTT (Tanggal-Bulan-Tahun) Hanya diisi jika tidak diterima langsung dari WP
2.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	TTTT (Tahun SPT)
3.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999999999-999.999
4.	NAMA WP, ALAMAT, JENIS USAHA	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
	PERIODE PEMBUKUAN		
5.	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	Pada kolom bagian tengah	Diisi: 1 = diaudit 0 = tidak diaudit
6.	OPINI AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	Diisi: 1 = wajar tanpa pengecualian 2 = wajar dengan pengecualian 3 = tidak wajar 4 = tidak ada opini
7.	PENGHASILAN NETO FISKAL	Kolom A.1.	All values
8.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	Kolom A.3.	Minimal 0
9.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom B.6.	Minimal 0
10.	PPh PASAL 25 BULANAN	Kolom C.10.a.	Minimal 0
11.	PPh YANG KURANG DIBAYAR atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (9 - 10)	Kolom D.11.	Minimal 0, = (C.9. - Jumlah C.10.), atau (Jumlah C.10. - C.9.)
12.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON	Kolom D.13.	Diisi: 0 = tidak diisi 1 = direstitusikan diperhitungkan dengan utang pajak
13.	PPh PASAL 25 : (1/12 HURUF f)	Kolom E.14g.	Minimal 0, (1/12 X F.f.)
14.	PEREDARAN USAHA	Kolom 1.a.(3). 1771-I	Minimal 0
15.	TANGGAL PEMBAYARAN PPh PASAL 29	SSP PPh PASAL 29	Date
16.	JUMLAH PPh PASAL 29	SSP PPh PASAL 29	Minimal 0, diisi > jika KODE Kolom D.11. = 1 (Kurang Bayar)

**PETUNJUK PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN BAGI WAJIB PAJAK YANG
DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR
AMERIKA SERIKAT PADA TEMPAT PELAYANAN TERPADU**

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER	KETERANGAN
	SPT TAHUNAN PPh WP BADAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT	INDUK SPT FORMULIR 1771 / \$	
1.	TANGGAL SPT DITERIMA	Tanggal SPT diterima	HH-B-TTTT (Tanggal-Bulan-Tahun) Hanya diisi jika tidak diterima langsung dari WP
2.	TAHUN PAJAK	Pada kotak sudut kanan atas	BB-TT s.d. BB-TT (Bulan Tahun s.d. Bulan Tahun)
3.	NPWP	Pada kolom bagian atas	999.999.99.9-999.999
4.	NAMA WP, ALAMAT, JENIS USAHA	Diambil dari data Master File WP	Berdasarkan NPWP
5.	PERSETUJUAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AS: NOMOR	Pada kolom bagian tengah	Karakter
6.	PERSETUJUAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AS: TANGGAL	Pada kolom bagian tengah	Date
7.	MULAI TAHUN PAJAK	Pada kolom bagian tengah	TTTT
8.	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	Pada kolom bagian tengah	Diisi: 1 = diaudit 0 = tidak diaudit
9.	OPINI AKUNTAN PUBLIK	Pada kolom bagian tengah	Diisi: 1 = wajar tanpa pengecualian 2 = wajar dengan pengecualian 3 = tidak wajar 4 = tidak ada opini
10.	PENGHASILAN NETO FISKAL	Kolom A.1. US \$	All values = kolom 6 formulir 1771-I
11.	PENGHASILAN NETO FISKAL	Kolom A.1. RUPIAH	All values
12.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	Kolom A.3. US \$	Minimal 0, (A.1. - A.2.)
13.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	Kolom A.3. RUPIAH	Minimal 0
14.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom B.6. US \$	Minimal 0, (B.4. + B.5.)
15.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG	Kolom B.6. RUPIAH	Minimal 0
16.	PPh PASAL 25 BULANAN	Kolom C.10.a. US \$	Minimal 0
17.	PPh PASAL 25 BULANAN	Kolom C.10.a. RUPIAH	Minimal 0
18.	PPh YANG KURANG DIBAYAR atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (9 – 10e)	Kolom D.11. US \$	Minimal 0, = (C.9. - Jumlah C.10.), atau (Jumlah C.10. - C.9.)
19.	PPh YANG KURANG DIBAYAR atau PPh YANG LEBIH DIBAYAR (9 - 10)	Kolom D.11. RUPIAH	Minimal 0
20.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON	Kolom E. Jika C.9. < Jumlah C.10.	Diisi: 0 = tidak diisi 1 = direstitusikan diperhitungkan dengan utang pajak
21.	PPh PASAL 25 : (1/12 HURUF f)	Kolom E.g. US \$	Minimal 0, (1/12 X F.f.)
22.	PPh PASAL 25 : (1/12 HURUF f)	Kolom E.g. RIBUAN RUPIAH	Minimal 0
23.	PEREDARAN USAHA	Kolom 1.a.(3). 1771-I\$	Minimal 0
24.	TANGGAL PEMBAYARAN PPh PASAL 29	SSP PPh PASAL 29	Date
25.	JUMLAH PPh PASAL 29	SSP PPh PASAL 29	Minimal 0, diisi > jika KODE Kolom D.11. = 1 (Kurang Bayar)

LEMBAR PENELITIAN SPT 1770
DENGAN KOMPUTER

NPWP
NAMA WP :
TAHUN PAJAK :

I. Unsur-unsur dalam SPT yang salah/seharusnya diisi :
Form 1770 – I
Bagian A :

- ☐ Jumlah 1.c. # (1.a. - 1.b.)
- ☐ Jumlah 1.e. # (1.c. - 1.d.)
- ☐ Jumlah 2.l. # (2.a. + 2.b. + + 2.j. + 2.k.)
- ☐ Jumlah 3.d. # (3.a. + 3.b. + 3.c.)
- ☐ Jumlah 4. # Jumlah (1.e + 2.l - 3.d)

Bagian B :

- ☐ Jumlah (3). # (1.(3). + 2.(3). + 3.(3). + 4.(3). + 5.(3).)
- ☐ Jumlah (5). # (1.(5). + 2.(5). + 3.(5). + 4.(5). + 5.(5).)

Bagian C :

- ☐ Jumlah (3). # penjumlahan item pada kolom (3)

Form 1770 - IIBagian A :

- ☐ Jumlah (7). # penjumlahan item pada kolom (7).

Form 1770 - IIIBagian A :

- ☐ Jumlah (4). # jumlah (I.1.(4). + ... + I.13.(4). + II.)

Bagian B :

- ☐ Jumlah (3). # (1.(3). + 2.(3). + 3.(3). + 4.(3). + 5.(3).)

Bagian C :

- ☐ # Penjumlahan

Form 1770

- ☐ A.1. # 1770-I Bagian A. atau Bagian B.(5).
- ☐ A.2. # 1770-I (Jumlah penghasilan pada Formulir 1721-A1 dan/atau 1721A2).
- ☐ A.3. # 1770-I Bagian C.JUMLAH.(3).
- ☐ A.4. # 1770-II Bagian A.JUMLAH.(7).
- ☐ A.5. # (A.1. + A.2. + A.3. + A.4.)
- ☐ A.7. # (A.5. - A.6.)
- ☐ B.9. # (A.7. - B.8.)
- ☐ B.10. # nilai PTKP
- ☐ B.11. # (B.9. - B.10.)
- ☐ C.12. # PENERAPAN TARIF Pasal 17 x B.11.
- ☐ C.14. # C.12 + C.13.
- ☐ D.15. # 1770-II Bagian A.(7)
- ☐ D.16. # (C.14 - D.15.) atau D.16. # (D.15. - C.14.)
- ☐ D.17. # (D.17.a. + D.17.b. + D.17.c. + D.17.d.)
- ☐ D.19.a. # (D.16. - D.18.) atau D.19.b. # (D.17. - D.18.)
- ☐ F # (16./12)

II. Ketepatan waktu penyampaian SPT dan penyetoran PPh Pasal 29 :
1. Tanggal Masuk SPT : (tepat waktu / terlambat)
2. Tanggal Pembayaran PPh : (tepat waktu / terlambat)
Pasal 29

.....-20..
Operator Data Entry,

.....
NIP

Berilah tanda √ dalam ☐ yang sesuai
D.1.1.22.02

DENGAN KOMPUTER

NPWP

NAMA WP :

TAHUN PAJAK :

- I. Unsur-unsur dalam SPT yang salah/seharusnya diisi :
Lampiran I Form 1770 S
Bagian A :

Jumlah Bagian A.(3) # penjumlahan item pada kolom A.(3).

Bagian B :

Jumlah Bagian B.(3) # penjumlahan item pada kolom B.(3).

Bagian C :

Jumlah Bagian C.(7) # penjumlahan item pada kolom C.(7).

Lampiran II Form 1770 S
Bagian A :

Jumlah Bagian A.(4). # penjumlahan item pada kolom A.(4).

Bagian B :

Jumlah Bagian B.(4). # penjumlahan item pada kolom B.(4).

Bagian C :

Jumlah Bagian C.(4). # penjumlahan item pada kolom C.(4).

Form 1770

A.1. # Akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1/1721-A2 angka 14

A.2. # Lampiran I 1770 S Jumlah Bagian A

A.4. # (A.1. + A.2. + A.3.)

A.6. # (A.4. + A.5.)

D.12. # 1770 S - I Jumlah Bagian C.(5).

B.7. # nilai PTKP

B.8. # (A.6. - B.7.)

C.9. # PENERAPAN TARIF Pasal 17 x B.8.

C.11. # C.9. + C.10.

D.13. # (C.11. - D.12.) atau D.13. # (D.12. - C.11.)

D.14. # (D.14.a. + D.14.b. + D.14.c.)

E.16. # (D.13. - D.14.) atau E.16. # (D.14. - D.13.)

Jumlah H # penjumlahan item pada kolom H.PPh TERUTANG.

Jumlah I # penjumlahan item pada kolom (I.a. + I.b. + I.c. + I.d. + I.e.)

II. Ketepatan waktu penyampaian SPT dan penyetoran PPh Pasal 29 :
1. Tanggal Masuk SPT : (tepat waktu / terlambat)
2. Tanggal Pembayaran PPh : (tepat waktu / terlambat)
Pasal 29

.....-20..

Operator Data Entry,

.....

NIP

D.1.1.22.03

LEMBAR PENELITIAN SPT 1770 SS DENGAN KOMPUTER

NPWP							
NAMA WP :							
TAHUN PAJAK :							

I.	Unsur-unsur dalam SPT yang salah/seharusnya diisi : Form 1770 SS	
		# Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun.
		# Jumlah keseluruhan kewajiban/utang pada akhir tahun.
II.	Ketepatan waktu penyampaian SPT dan penyetoran PPh Pasal 29 :	
	Tanggal Masuk SPT	: (tepat waktu / terlambat)

.....-20..
Operator Data Entry,

.....
NIP

Berilah tanda ✓ dalam ☐ yang sesuai

NPWP

NAMA WP :

TAHUN PAJAK :

Form 1771 - I

- Form 1771 - II

- Form 1771 - III

- Form 1771 - IV

- Form 1771 - V

- Form 1771 - VI

- Form 1771

1. Tanggal Masuk : (tepat waktu / terlambat)
2. Tanggal Pembayaran PPh : (tepat waktu / terlambat)

.....
NIP

info@peraturanpajak.com

LEMBAR PENELITIAN SPT 1771/\$
DENGAN KOMPUTER

NPWP

NAMA WP :

TAHUN PAJAK :

I. Unsur-unsur dalam SPT yang salah/seharusnya diisi :

Form 1771 - I/\$

Jumlah 1.d. # (1.a. - 1.b. - 1.c.)

Jumlah 1. d dan e # (1.d. + 1.e.)

Jumlah 5. a s.d 1 # (5.a. + 5.b. + + 5.k. + 5.l.)

Jumlah 6. a s.d d # (6.a. + 6.b. + 6.c. + 6.d.)

Jumlah 8 # Jumlah (1. - 4. + 5. - 6. - 7.)

Form 1771 - II/\$

Jumlah PPh Pasal 22.(5). # penjumlahan item PPh Pasal 22.(5).

Jumlah PPh Pasal 23.(5). # penjumlahan item PPh Pasal 23.(5).

Jumlah # Jumlah PPh Pasal 22.(5). + Jumlah PPh Pasal 23.(5).

Form 1771 - III/\$

Jumlah kolom (5). # penjumlahan item pada kolom (5)

Form 1771 - IV/\$

Jumlah Bagian A.(5). # Jumlah (A.1. + A.2. + + A.13.)

Jumlah Bagian B.(3). # Jumlah (B.1. + B.2. + B.3. + + B.7.)

Form 1771 - V/\$

Jumlah Bagian A.(4). # penjumlahan item pada kolom (4) dan kolom (5).

Form 1771 - VI/\$

Jumlah Bagian A.(4). # penjumlahan item pada kolom (4).

Form 1771/\$

A.1. # 1771-I/\$ kolom 8.(3).

C.8.a. # 1771-III\$ kolom JUMLAH.(5).

C.8.b. # Lampiran Khusus 7A kolom (7).

E.a. # 1771-IV/\$ Bagian A.JUMLAH.(5).

E.b. # 1771-IV/\$ Bagian B.JUMLAH.(3).

A.3. # (A.1. - A.2.)

B.4. # penerapan tarif Pasal 17 x A.3.

B.6. # (B.4. + B.5.)

C.8. # Jumlah (C.8.a. + C.8.b.)

C.9.a. # B.6. - (C.7. + C.8.) atau C.9. # (C.7. + C.8.) - B.6.

C.10. # (C.10.a. + C.10.b. + C.10.c. + C.10.d.)

D.11.a. # (C.9. - C.10.) atau C.11.b # (C.10. - C.9.)

E.14.c. # (E.14.a. - E.14.b.)

E.14.d. # penerapan tarif Pasal 17 x E.14.c.

E.14.f. # (E.14.d. - E.14.e.)

E.14.g. # (E.14.f. / 12)

II. Ketepatan waktu penyampaian SPT dan penyetoran PPh Pasal 29 :

1. Tanggal Masuk : (tepat waktu / terlambat)

2. Tanggal Pembayaran PPh Pasal : (tepat waktu / terlambat)

29

.....-20....
Operator Data Entry,

.....
NIP

www.peraturanpajak.com

Page : 55

info@peraturanpajak.com

Berilah tanda √ pada kotak ☐ yang diperlukan
D.1.1.22.05

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : 24/PJ/2009
TANGGAL : 27 Februari 2009

**TATA CARA DISTRIBUSI TANDA TERIMA SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN**

Kepala Seksi Pelayanan

1. Nomor Tanda Terima dibuat/dicetak prenumbered, banyaknya disesuaikan dengan perkiraan SPT Tahunan yang akan diterima.
2. Setiap hari Tanda Terima dibagikan kepada petugas penerima SPT Tahunan pada TPT/Mobil Pajak/Pojok Pajak/Drop Box.
3. Pembagian berdasarkan perkiraan SPT Tahunan yang akan diterima dalam satu hari.
4. Mencatat penyerahan Tanda Terima pada Kartu Pengawasan Penggunaan Nomor Tanda Terima sebagaimana Lampiran III.1.
5. Setiap hari menerima Tanda Terima yang tidak terpakai yang dikembalikan oleh petugas penerima SPT Tahunan.
6. Pengembalian Tanda Terima yang tidak terpakai juga harus dicatat pada Berita Acara Serah Terima Berkas Penerimaan SPT Tahunan sebagaimana Lampiran I.2.
7. Tanda Terima yang tidak terpakai tersebut dapat digunakan untuk penerimaan SPT Tahunan pada hari-hari berikutnya.

Petugas penerima SPT pada TPT/Mobil Pajak/Pojok Pajak/Drop Box

1. Menerima Tanda Terima yang telah diberi nomor (prenumbered) dari Kepala Seksi Pelayanan dan menandatangani Kartu Pengawasan Penggunaan Nomor Tanda Terima.
2. Memberikan Tanda Terima yang telah ditandatangani dan diberi tanggal penerimaan SPT Tahunan dan diberi cap kepada WP yang menyampaikan SPT Tahunan sesuai prosedur yang diatur pada Lampiran I.
3. Setiap hari Tanda Terima yang belum terpakai dikembalikan pada Kepala Seksi Pelayanan bersamaan dengan Berita Acara Serah Terima Berkas Penerimaan SPT Tahunan sebagaimana Lampiran I.2 dan berkas SPT Tahunan.

BAGAN ALUR KERJA



KARTU PENGAWASAN PENGGUNAAN NOMOR TANDA TERIMA
KPP

No.	Unit Drop Box/TPT/ Mobil Pajak/Pojok Pajak	Nomor Tanda Terima yang diberikan	Tanggal	Tanda Tangan Penerima	Nomor Tanda Terima yang dikembalikan	Tanda Tangan Penerima Pengembalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut, berlanjut sampai dengan akhir tahun.
- Kolom (2) : diisi dengan Unit Drop Box/Mobil Pajak/Pojok Pajak/TPT dimana tempat pelayanan penerimaan SPT diselenggarakan, misal : Drop Box Mal Pondok Indah dsb.
- Kolom (3) : diisi dengan blok Nomor Tanda Terima yang diberikan, contoh: Nomor 0000001 s.d. 0002000 dst.
- Kolom (4) : diisi dengan tanggal penyerahan Nomor Tanda Terima
- Kolom (5) : diisi dengan Tanda Tangan petugas Unit Drop Box/Mobil Pajak/Pojok Pajak/TPT yang menerima Nomor Tanda Terima.
- Kolom (6) : diisi dengan Nomor Tanda Terima yang dikembalikan ke Kepala Seksi Pelayanan, contoh: 0001851 s.d. 0002000.
- Kolom (7) : diisi Tanda Tangan petugas yang menerima kembali Nomor Tanda Terima